

E-NEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SINGKAT

Edisi Desember I 2020

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



KH. Aus Hidayat Nur

Bentuk TPF Independen!

*Kasus Penembakan Anggota
Front Pembela Islam*

Berjaya **Ditengah** Nestapa

Melakukan tindakan korupsi ditengah bencana sungguh merupakan perbuatan yang tercela, bukan hanya merusak tatanan hukum tapi juga menghancurkan etika dan moral. Mengapa bisa begitu tega meraih selisih keuntungan (margin) sendi kondisi bangsa sedang prihatin.

Entah apa yang ada dalam benak orang-orang itu, mengapa dikala banyak orang menghimpun raga dan menyatukan kesetiakawanan sosial. Mereka justru sibuk merobek ikatannya dari dalam. Dengan cara mengutip, memotong, mencari keuntungan dan menggumpulkannya untuk kemudian dijadikan tembikar pesta pora.

Ironisnya, mereka yang melakukan kegiatan tercela ini sempat tersaji dalam ratusan publikasi dan mendapat penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Dipuji dan dielukan, namun melakukan kejahatan dalam kebijakan yang menyangkut orang banyak. Sungguh-sungguh tercela karena telah

merusak nurani setiap akal waras anak bangsa, mengapa mereka begitu tega mengambil disituasi buruk seperti saat ini.

UU telah mengamankan bahwa salah satu cara untuk memberikan bantalan bagi masyarakat tidak berdaya dengan Bantuan sosial (Bansos), namun bukan rahasia lagi barang ini seringkali tidak utuh dan lengkap sampai ke masyarakat. Sudah jadi cerita mahsyur, bansos dibagi dua dan seterusnya. Lebih ironis lagi bansos terhambat karena kantong bansos telah disablon. Disaat semua pihak "getol" kampanyekan 3M, eh dia malah sibuk "ngembat" 17 M.

Anehnya perilaku kutip bansos covid terjadi dari hulu sampe hilir, dari besar sampai kecil. Mengalir sampai jauh ke pusat-pusat kuasa, yang kita pikir mereka tidak suka dana-dana kaum dhuafa. Ternyata mereka mengutip dari apa yang tersedia. Terlalu !!

Bersyukur perhelatan Pilkada tahun 2020 relatif lancar dan sukses, ditengah

pageblug yang masih belum usai. Angka covid 19 enggan turun, salah satu bukti dari kebijakan yang tidak serius dan sistemik diterapkan sejak awal. Penerapan protokol kesehatan serius diterapkan kala menyinggung orang per orang dan institusi, hingga pelanggarnya diintai dan detersangkakan. Dor !! akhirnya diantara mereka terkujur lunglai meregang nyawa.

Hari ini kita menjadi sangat pilu ketika kegaduhan tak kunjung usai, salah satunya karena pemimpin negara seakan nyaman memelihara simpatisan namun membiarkan pihak berbeda pandangan menerima penegakan hukum yang lunglai. Aksi-aksi penindakan tanpa keputusan pengadilan dibiarkan selesai dijalanan, kemudian dipublikasikan tanpa rasa empati.

Rumitnya tidak ada satu pun kata terucap maupun status teresam di sosial media sang pemimpin. Seakan tak terjadi apa-apa dan kehidupan berjalan normal, meski kejadian

KUTIPAN

Hari ini kita menjadi sangat pilu ketika kegaduhan tak kunjung usai, salah satunya karena pemimpin negara seakan nyaman memelihara simpatisan namun membiarkan pihak berbeda pandangan menerima penegakan hukum yang lunglai. Aksi-aksi penindakan tanpa keputusan pengadilan dibiarkan selesai dijalanan, kemudian dipublikasikan tanpa rasa empati

tersebut sejengkal dari pusat kekuasaan. Mungkin terlalu sibuk memupuk anak dan kerabat maju meraih kuasa.

Jika cermat dan tekun membaca tanda alam sungguh denting sirine peringatan berputar sangat keras. Beribun layaknya tanda pesta diskon jelang akhir tahun di pusat perbelanjaan. Beribun disemua sisi. Dalam alam demokrasi dan supremasi sipil, saat ini kita dipaksa terbiasa menemukan orang yang

berlagak kuasa dengan senjata.

Di sektor kesehatan betapa sering kabar orang-orang terdekat wafat sebab pageblug, baik lewat tutur kata atau berbagai aplikasi pesan seperti *Whatsapp*. Duka itu semakin dekat. Dalam kehidupan sosial, gesekan terasa tajam dan meruncing karena penegakan hukum tidak bersimpuh di pusat keadilan. Kita sungguh khawati kapal akan karam dan tersungkur dibatu karang egoisme.

Fraksi PKS Minta Klarifikasi Kapolri dan Dorong Bentuk Tim Pencari Fakta Independen

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar FPI bahkan hingga menyebabkan 6 orang Laskar FPI merenggang nyawa. Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. Sementara di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini.

"Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai," ungkap Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP.

Dalam perkembangannya kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 orang anggota Laskar FPI.

"Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel," katanya.

Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.

"Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional seperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia," tekan Jazuli.

Oleh karena itu, seluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.

Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum," pungkas Jazuli.

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional seperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia

Penembakan Anggota FPI, PKS: **Segera Bentuk** Tim Pencari Fakta Independen

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Aus Hidayat Nur menyampaikan meninggalnya enam anggota FPI dalam peristiwa di Tol Cikampek, Senin (07/12/2020) dini hari.

Menurut Aus, meninggalnya enam orang anggota FPI seharusnya tidak perlu terjadi karena sebenarnya sebagai warga Indonesia hak hidup mereka dilindungi.

"Bukankah selama Kapolri selalu menyampaikan bahwa Polri menganut asas 'Salus Populi Suprema Lex Esto' atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," papar Aus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (08/12).

Bagi Aus, tindakan terhadap enam orang anggota FPI dapat dikategorikan sebagai tindakan extra-judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan.

Ia menegakkan, tindakan seperti ini dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum HAM

internasional maupun peraturan perundang-undangan Nasional.

"Larangan tersebut dimuat di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, serta International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005," urai Aus.

Aus menerangkan, extra-judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang. Hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (non-derogable rights).

"Oleh karenanya, tindakan demikian tidak dapat dibenarkan oleh negara hukum

seperti Indonesia," ungkap Aus.

Aus menambahkan, tindakan ini juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang.

"Jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh enam orang tersebut, seharusnya dapat diproses sebagaimana ketentuan pidana yang berlaku. Akibat terjadinya extra-judicial killing mereka tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya karena saat ini sudah meninggal dunia," terangnya.

Aus meminta dibentuknya Tim Independen dari Komnas HAM atau Tim Gabungan Pencari Fakta, untuk mendalami perkara ini dengan baik dan benar.

"Sebab terjadi perbedaan yang signifikan antara keterangan yang di sampaikan oleh pihak Kepolisian dan FPI, saya mendorong untuk dibentuk tim independen," ujarnya.

**KH. AUS HIDAYAT NUR**

Anggota Komisi III DPR RI

Jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh enam orang tersebut, seharusnya dapat diproses sebagaimana ketentuan pidana yang berlaku. Akibat terjadinya extra-judicial killing mereka tidak akan dapat diadili dengan adil dan berimbang untuk membuktikan tuduhan yang disampaikan kepadanya karena saat ini sudah meninggal dunia,

Bukhori Mengecam Insiden Penembakan yang Renggut Nyawa Laskar FPI

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengaku geram dan mengecam keras insiden penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat sehingga mengakibatkan meninggalnya 6 anggota laskar FPI.

Bukhori menganggap insiden mematikan yang menimpa anggota FPI saat tengah mengawal Habib Rizieq Shihab untuk mengisi pengajian subuh tersebut sebagai tindakan biadab dan tidak berperikemanusiaan.

“Saya mengutuk tindakan pembunuhan tersebut. Sejujurnya, saya sangat menyesalkan tindakan oknum yang sangat gegabah dalam melakukan penindakan tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya 6 nyawa manusia sekaligus. Sebagai orang yang terlatih, semestinya penggunaan senjata oleh aparat adalah upaya terakhir yang dilakukan dalam rangka melindungi diri dan/atau orang lain dengan cara melumpuhkan, bukan mematikan,” tegas Bukhori di

Jakarta, Selasa (08/12).

Bukhori menambahkan, dalam perspektif Islam, nyawa manusia ditempatkan dalam kedudukan yang sangat berharga. Pasalnya, bila terdapat seseorang yang dengan sengaja menghilangkan satu nyawa manusia, maka sama halnya dengan telah menghilangkan seluruh nyawa manusia.

Di sisi lain, ketentuan penggunaan senjata sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pada pasal 2 ditegaskan bahwa tujuan dari penggunaan kekuatan adalah untuk pencegahan tindakan pelaku kejahatan dan perlindungan diri atau masyarakat dari perbuatan

yang mengancam.

Sementara, dalam pasal 3 disebutkan bahwa prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus mengedepankan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Sementara, Anggota Komisi VIII ini juga menyoroti sejumlah kejanggalan dalam insiden tersebut. Misalnya, lokasi TKP tewasnya keenam anggota FPI yang tidak teridentifikasi dengan jelas, bukti proyektil peluru yang bersarang di mobil petugas jika benar terjadi baku tembak, hingga fungsi intelijen yang seolah kecolongan karena tidak mampu melakukan antisipasi dini jika benar anggota laskar terbukti memiliki senjata.

Alhasil, Bukhori memandang terdapat missing link dalam narasi yang disampaikan oleh Polri sehingga ruang yang tidak utuh tersebut justru menimbulkan skeptisisme bagi publik.

Lebih lanjut, Ketua DPP PKS ini menganggap ada dugaan pelanggaran HAM serius yang telah dilakukan akibat arogansi oknum aparat.

**KH. BUCHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

“Ini adalah tindakan teror terhadap pemuka agama untuk kesekian kalinya. Ironisnya, tindakan kali ini justru dimotori oleh oknum aparat hingga mengakibatkan terenggutnya nyawa orang lain yang tidak bersalah

Sebab, jika mengacu pada keterangan resmi DPP FPI menyebutkan bahwa anggota mereka yang menjadi korban justru tidak membawa senjata api maupun senjata tajam atau dalam posisi mengancam aparat sebagaimana dituduhkan oleh pihak Polri.

Terlebih, kejanggalan semakin menguat mengingat posisi para korban saat itu adalah dalam rangka melakukan pengawalan HRS yang akan melakukan dakwah

keluar kota, bukan mobilisasi massa ke dalam kota dalam rangka menghalangi penyidikan Polri terhadap HRS sebagaimana dirisaukan oleh aparat.

“Ini adalah tindakan teror terhadap pemuka agama untuk kesekian kalinya. Ironisnya, tindakan kali ini justru dimotori oleh oknum aparat hingga mengakibatkan terenggutnya nyawa orang lain yang tidak bersalah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pesan Ke Moeldoko

Nasir Djamil Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Kematian 6 Jemaah FPI

KUTIPAN

Jakarta (08/12) -- Selain soal staf khusus milenial yang bekerja offside di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga dicecar oleh anggota dewan soal adanya penembakan enam jemaah FPI oleh aparat kepolisian, Senin, (7/12).

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyampaikan harapannya kepada Moeldoko untuk segera membentuk tim pencari fakta terkait kasus penembakan jemaah Front Pembela Islam (FPI).

"Pak Moeldoko kami harap mudah mudahan Pak Presiden membentuk tim pencari fakta terkait dengan kasus tersebut," ucap Nasir dalam rapat kerja bersama Komisi II dengan KSP Moeldoko, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung yang keduanya diwakilkan oleh stafnya, di gedung kurakura, Komplek Parlemen,

Senayan, Senin (7/12).

Nasir mengatakan, perlu adanya tim pencari fakta agar tidak ada simpang siur di tengah masyarakat terkait berita penembakan enam jemaah FPI oleh aparat kepolisian di Tolgate Karawang tersebut.

"Karena ada kesimpang siuran informasi terkait peristiwa tersebut, mudah-mudahan dengan tim pencari fakta, kita daatkan kebenaran dengan peristiwa tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan belum bisa banyak memberikan komentar mengenai penembakan enam anggota FPI tersebut oleh kepolisian.

"Tentang tim pencari fakta saya belum bisa memberikan komentar, tapi akan kami sampaikan nanti," tandasnya.



H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.
Anggota Fraksi PKS DPR RI

"Pak Moeldoko kami harap mudah mudahan Pak Presiden membentuk tim pencari fakta terkait dengan kasus tersebut. Karena ada kesimpang siuran informasi terkait peristiwa tersebut, mudah-mudahan dengan tim pencari fakta, kita daatkan kebenaran dengan peristiwa tersebut."

Enam Laskar FPI Ditembak Mati

Netty: Apa Penjelasan Negara pada Keluarga Korban?

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) ditembak mati aparat kepolisian di jalan tol Jakarta-Cikampek saat bertugas mengawal Habib Rizieq Shihab (HRS).

Menurut pihak FPI, saat itu HRS juga ditemani oleh keluarga dan cucunya yang masih balita.

Ketua DPP PKS Netty Prasetyani Aher mengaku prihatin dan menyalkan terjadinya penembakan tersebut.

"Aparat harus mengutamakan cara persuasif dalam penanganan setiap kejadian. Jika diukur sebagai ancaman, bukankah ada prosedur melumpuhkan tanpa harus menembak mati? Mereka toh tidak dalam pengejaran sebagai teroris. Ini pelanggaran HAM serius yang dapat merusak citra kepolisian," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (08/12).

Sebagai politisi yang

mencermati isu perempuan, anak dan keluarga, Netty mempertanyakan bagaimana negara memberikan penjelasan kepada keluarga mereka.

"Berdasarkan info, mereka masih berusia 20-an, masih terbilang muda. Tentu mengesankan bagi keluarga mereka untuk menerima kematian dengan cara seperti itu. Sebagai seorang Ibu, saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Ibu atau keluarga mereka. Jadi, negara harus memberikan penjelasan yang transparan dan jujur kepada keluarga almarhum," kata Netty.

Peristiwa penghadangan dan penembakan ini mengundang sorotan besar dari

masyarakat dan pejabat publik. Bahkan beberapa pihak meminta agar dibentuk Tim Pencari Fakta Independen atas insiden tersebut.

"Saya meminta agar kasus ini dibuka dan diselesaikan dengan transparan. Ada banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Misalnya, kenapa kejadian ini berbarengan dengan matinya CCTV di sekitar lokasi? Apalagi di media sosial beredar cerita kejadian dengan versi berbeda," tambah Netty.

Terakhir Netty mengingatkan bahwa aparat kepolisian adalah pangayom masyarakat yang sudah seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman.

"Penembakan ini justru menggambarkan aksi kesewenangan yang dapat menimbulkan kesan menakutkan bagi masyarakat. Aparat yang harusnya jadi pengayom dan dekat dengan masyarakat justru menjadi momok," tandasnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Saya meminta agar kasus ini dibuka dan diselesaikan dengan transparan. Ada banyak pertanyaan publik yang belum terjawab. Misalnya, kenapa kejadian ini berbarengan dengan matinya CCTV di sekitar lokasi? Apalagi di media sosial beredar cerita kejadian dengan versi berbeda."

Dorong Bentuk TPF Seperti Papua

Mardani Ali Sera: Nyawa Satu Orang Mahal Sekali, **Apalagi Enam**

KUTIPAN

Jakarta (07/12) --- Peristiwa penembakan hingga menghilangkan nyawa enam pengawal Habib Rizieq Shihab adalah kejadian luar biasa. Oleh karenanya, peristiwa yang terjadi pada Senin dini hari (7/12) tersebut perlu diusut tuntas.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera dalam merespons insiden penembakan di Tol Cikampek antara pihak kepolisian dan laskar Front Pembela Islam (FPI).

"Kejadian meninggalnya enam orang pengawal Habieb Rizieq semalam, shock dan luar biasa mengejutkan. Nyawa satu orang itu mahal sekali, ini enam orang. Ini kejadian luar biasa," kata Mardani di akun Twitternya, Senin (7/12).

Menurutnya, kejadian tersebut tak bisa dianggap sepele. Perlu ada keterlibatan tim independen untun mengusut hingga tuntas kebenaran

yang terjadi.

Mardani pun mendesak pihak-pihak terkait untuk membentuk tim pencarian fakta sama halnya dengan insiden yang terjadi di Papua.

"Satu kematian di Papua dibuatkan tim pencari fakta, ini enam orang. Perlu segera diusulkan tim pencari fakta. Semua mesti mengambil pelajaran dari kasus luar biasa ini," tandasnya.

Di sisi lain, pihak kepolisian menyebut penembakan terhadap enam orang dilakukan karena para pengikut Habib Rizieq terlebih dahulu melakukan penyerangan kepada aparat kepolisian.

Kapolda Metro Jaya, Irjen

Fadil Imran mengatakan, insiden tersebut bermula saat kepolisian melakukan penyelidikan kelompok pengikut Habib Rizieq yang akan datang ke PMJ pada saat pemeriksaan kedua.

"Pada saat di tol mengikuti kendaraan pengikut tersebut, kendaraan petugas dipepet dan diberhentikan oleh dua kendaraan pengikut. Kemudian melakukan penyerangan dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai, celurit kepada anggota," kata Fadil Imran kepada wartawan, di Mapolda, Jakarta.

Karena akan membahayakan keselamatan jiwa petugas pada saat itu, petugas kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur. Tindakan tegas dan terukur mengakibatkan enam orang penyerang meninggal dunia dan empat orang melarikan diri.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Fraksi PKS DPR RI

"Kejadian tersebut tak bisa dianggap sepele. Perlu ada keterlibatan tim independen untun mengusut hingga tuntas kebenaran yang terjadi. Satu kematian di Papua dibuatkan tim pencari fakta, ini enam orang. Perlu segera diusulkan tim pencari fakta. Semua mesti mengambil pelajaran dari kasus luar biasa ini,

Kasus Penembakan Anggota FPI

PKS: Bentuk Tim Pencari Fakta Independen!



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional seperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional

JAZULI JUWAINI

“Pimpinan Polri harus bisa objektif. Kita juga harus memperhatikan dan menunjukkan rasa empati terhadap korban. Intinya, keadilan harus dijunjung tinggi di negara hukum”

DIMYATI NATAKUSUMAH

“Situasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan Imparsial, agar tidak terjebak pada sengketa informasi yang menyesatkan”

ADANG DARADJATUN

“Jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh enam orang tersebut, seharusnya dapat diproses sebagaimana ketentuan pidana yang berlaku”

AUS HIDAYAT NUR

Karena ada kesimpang siuran informasi terkait peristiwa tersebut, mudah-mudahan dengan tim pencari fakta, kita daatkan kebenaran dengan peristiwa tersebut.”

NASIR DJAMIL

“Semestinya pemerintah menjadi yang terdepan dalam melindungi setiap warga negaranya, sekalipun mereka berseberangan pikiran”

BUKHORI YUSUF

“Saya meminta agar kasus ini dibuka dan diselesaikan dengan transparan. Ada banyak pertanyaan publik yang belum terjawab.”

NETTY PRASETYANI

“Kejadian tersebut tak bisa dianggap sepele. Perlu ada keterlibatan tim independen untun mengusut hingga tuntas kebenaran yang terjadi.”

MARDANI ALI SERA

Calling Visa Untuk Penjajah Palestina

Aleg FPKS: Pemerintah Harus Hentikan Demi Menjaga Ketertiban dan Perdamaian

KUTIPAN

Jakarta (04/12) -- Anggota Komisi II FPKS DPR RI, Dr.K.H. Surahman Hidayat, M.A, menanggapi sikap pemerintah, menyusul keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Imigrasi yang mulai membuka pelayanan calling visa bagi sejumlah negara asing salah satunya Israel.

Hal tersebut disampaikan Surahman pada acara PKS Legislatif Corner dengan tema Calling Visa Untuk Penjajah Palestina, Jakarta, Jumat (04/12/2020).

"Kondisi Indonesia saat ini sedang sakit, khususnya dari sisi kedaulatan internal maupun eksternal," kata Surahman, yang juga Anggota BKSAP.

Surahman menyebutkan, bahwa yang mengancam kedaulatan internal yakni papua barat yang mencoba untuk

mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian, kedaulatan eksternal yaitu seperti calling visa untuk penjajah palestina.

"Calling tersebut patut dipertimbangkan dari perspektif kedaulatan, budaya atau keadaban artinya tidak bisa sembarangan," tegas Surahman.

Surahman menyatakan, bahwa hal tersebut berdampak sangat rawan dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan

keimigrasian bagi Indonesia.

Bahwa bebas visa diperbolehkan secara wajar akan tetapi makna calling visa artinya mengundang, seakan-akan memiliki kepentingan.

Ia juga menambahkan, bahwa calling visa terhadap negara Israel merupakan salah satu bentuk mencederai salah satu negara yang telah mengakui kemerdekaan Negara Indonesia yaitu Palestina.

"Calling Visa ini menyedihkan, amanat dari negara ini yaitu politik bebas aktif seharusnya dikembalikan dengan standar-standar kita sesuai dengan amanah dan konstitusi negara Indonesia," jelas Surahman.

Ia juga menegaskan agar proses calling visa tersebut distop dan dihentikan serta jangan diteruskan demi menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.



Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, M.A.

Anggota BKSAP DPR RI

Calling Visa ini menyedihkan, amanat dari negara ini yaitu politik bebas aktif seharusnya dikembalikan dengan standar-standar kita sesuai dengan amanah dan konstitusi negara Indonesia.



PKS

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kreatif, Atraktif, Substantif



Teror di Poso

Toriq: Redam Terorisme Dengan Menemukan Akar Masalah

KUTIPAN

Kabupaten Banyumas (02/12) -- Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Adil memastikan keberangkatan pasukan khusus ke Poso, Sulawesi Tengah dalam rangka membantu kepolisian memburu kelompok teror di Sigi.

Anggota Komisi I DPR RI Toriq Hidayat menegaskan bahwa PKS tegas tidak setuju dengan segala bentuk terorisme. Pernyataan tersebut terkait serangan teror di Sigi, yang berujung pada meninggalnya empat orang warga di sana.

"Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti teroris, Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang menghidupkan teroris itu sendiri, keduanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian " kata politisi PKS saat kunjungan kerja ke Korem

071/Wijaya Kusuma, (01/11/2020).

Menurutnya, kedamaian di Poso selalu terkoyak. Fakta masa lalu konflik Poso begitu dalam telah meninggalkan luka, hingga begitu mudahnya Poso di siram air garam untuk bisa maradang kembali.

"Upaya masyarakat Poso menjahit luka dengan segenap kemandiariannya ternyata tidak sejalan dengan syahwat segelintir oknum yang bermain untuk menjadikan Poso kehilangan rasa aman dan nyaman", ungkap Toriq.

Senada dengan Wakil Ketua Majelis Syuro, Sohibel

Iman, Toriq mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme belum menyentuh akar permasalahan terorisme.

"Sesungguhnya akar masalah dari terorisme adalah ketidakadilan. Dimana tidak sedikit orang menjadi teroris karena kebijakan yang dirasa tidak berkeadilan", ungkap Toriq

Untuk itu, Toriq meminta agar Pemerintah mengajak semua pihak berdialog dan bersama mencari solusi terbaik tentang pemberantasan terorisme yang efektif.

"Janganlah memberantas yang kecil sekali dengan senjata yang demikian luar biasa," tutup Toriq.

**KH TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi I DPR RI

Sikap PKS jelas tidak menyetujui kekerasan apapun bentuknya. Kami anti teroris, Namun kami juga tidak menyetujui perilaku yang menghidupkan teroris itu sendiri. keduanya harus dihilangkan. Kita ingin perdamaian

Kemajuan Media Digital

Aleg PKS: Ini Tantangan Bagi Indonesia

KUTIPAN

Jakarta (08/12) – Anggota Legislatif Komisi I dari Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyebutkan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dengan adanya kemajuan digital

Hal ini disampaikan dalam acara Bincang Parlemen, Selasa (08/12).

Menurut Sukamta, salah satu tantangan ini adalah adanya potensi penyalahgunaan data oleh perusahaan-perusahaan besar lewat algoritma digital. Apalagi, ada polarisasi di dalam masyarakat sebagai dampak dari adanya penggunaan media digital, yang membuat mereka memungkinkan untuk memanen data tersebut.

“Masyarakat kita saat ini sudah terpolarisasi akibat adanya penggunaan media digital. Perusahaan besar dapat mengumpulkan data-data kita yang kemudian akan dianalisis dengan algoritma. Di saat kita menggunakan smartphone,

mereka dapat mengetahui aktivitas dan perilaku kita. Data-data tersebut kemudian dapat dipetakan dan dipanen oleh orang lain” jelas Sukamta.

Meskipun begitu, Sukamta menyebutkan bahwasanya digitalisasi memberikan pengaruh positif bagi para pengusaha, terutama UMKM.

“Para penjual batik mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Dengan adanya media digital mereka bisa berinteraksi dengan masyarakat luas melalui smartphone. Hal tersebut berdampak pada penjualan mereka yang mencapai 100% dengan bantuan digital” ungkap Sukamta.

Disisi lain, Sukamta menekankan peran proaktif

negara terhadap ancaman-ancaman dunia digital yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Sayangnya, sikap proaktif pemerintah masih kurang. Ini bisa dilihat dari adanya celah dalam peraturan dunia digital seperti UU ITE.

“Indonesia telah menyadari kebutuhan etika dalam berinteraksi melalui media digital. Memang peraturan mengenai kejahatan sosial sudah tercantum dalam UU ITE pasal 27-29, namun ini masih sering disalahgunakan. Pemerintah tidak boleh menjadikan peraturan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak tertentu” tuturnya.

Selanjutnya, Sukamta membandingkan peran digital di Indonesia yang sangat timpang dengan kemajuan digital di beberapa negara yang mengarah pada hal produktif, positif, dan suportif.

“Di Indonesia, media digital cenderung dijadikan sebagai alat untuk memberikan ujaran kebencian sehingga banyak konflik yang terjadi. Sementara, di beberapa negara media digital menjadi tempat diskusi dan support bagi masyarakat” terang Sukamta.

Di akhir acara, Sukamta berharap pemerintah dapat memaksimalkan tata kelola konten agar konten-konten yang berisi hal negatif ataupun ancaman dapat diatasi dengan baik dan benar.



H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

“Indonesia telah menyadari kebutuhan etika dalam berinteraksi melalui media digital. Memang peraturan mengenai kejahatan sosial sudah tercantum dalam UU ITE pasal 27-29, namun ini masih sering disalahgunakan. Pemerintah tidak boleh menjadikan peraturan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak tertentu”

Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Mardani Ali Sera: Pemerintah Harus Masifkan Demi Efisiensi dan Kaya Fungsi

KUTIPAN

Jakarta (02/12) -- Anggota FPKS DPR RI Dapil Dapil DKI Jakarta I, Mardani Ali Sera menyampaikan kritik dan sarannya kepada Pemerintah.

Hal tersebut menanggapi keputusan Jokowi yang kembali membubarkan 10 Lembaga Nonstruktural (LNS). Demi terwujudnya percepatan birokrasi & pelayanan publik yang cepat, keputusan menghapus lembaga tersebut perlu dilakukan. Akan tetapi harus dipastikan selaku dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah.

"Terlebih masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berupaya hukum/Keppres tapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asal sehingga hanya menghabiskan

uang negara," kata Mardani.

Ia menjelaskan, bahwa jika melihat data Kemenpan dan RB, dari 98 LNS yang ada, 71 LNS dibentuk melalui UU, lalu 6 LNS dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, sementara 21 LNS dibentuk melalui perpres/keppres. Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus.

"Pembubaran ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tak ibarat 'gali lubang tutup lubang'. Lakukan analisis sesuai grand desain reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua mesti dihitung

dengan data & fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN / pekerjanya," jelas Mardani.

Ia menambahkan, bahwa selain itu, struktur & bangunan politik lembaga eksekutif juga boros badan. Mas Dahlan Islan di Indonesia Leaders Talk (ILT), pernah mengutarakan betapa banyak BUMN yang tidak sehat & layak dimatikan demi efisiensi, namun terkendala pilihan politik yg seakan menjadikannya 'romantisme masa lalu'.

"Pemerintah juga perlu mengedepankan transparansi selama proses pembubaran LNS ini. Libatkan pakar administrasi publik selama prosesnya, kemudian kajiannya juga harus dibuka kepada publik agar masukan yang masuk tidak hanya dari unsur pemerintah/DPR saja," tambah Mardani.

Kemudian, ia juga menegaskan, bahwa transparansi penting agar masyarakat yakin mana LNS layak/tidak untuk dibubarkan. Reformasi birokrasi memang mengharuskan konsisten dengan data maupun fakta yang objektif.

"Akan lebih baik ketika Indonesia berhasil mewujudkan kementerian dan lembaga yang ramping, miskin struktur, namun kaya fungsi. Terlebih jika belajar dari pengalaman pandemi Covid-19 ini menunjukkan, banyak pekerjaan yang dapat disederhanakan dan disatukan," tegas Mardani.



Dr. H. MARDANI, M.Eng
Anggota Komisi II DPR RI

Pembubaran ini juga harus didasarkan pada desain yang kokoh, agar tak ibarat 'gali lubang tutup lubang'. Lakukan analisis sesuai grand design reformasi birokrasi yang sudah ada. Semua mesti dihitung dengan data & fakta serta siapkan mitigasinya, khususnya untuk ASN / pekerjanya

Tanggapi Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI

Aleg PKS: **Harus Dikaji Secara Mendalam!**

KUTIPAN

Jakarta (07/12) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Dimiyati Natakusumah menyatakan bahwa kasus penembakan yang menewaskan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) perlu dikaji secara mendalam dan terus dikawal oleh semua pihak. Hal ini disampaikannya dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Senin malam, (07/12).

“Jadi ketika melihat kasus ini, kita harus pelajari kerangkanya dulu. Membaca anatomi perkaranya. Melihat substansi, dikaji, ditelaah, semua pihak harus memonitor (perkembangannya). Jangan sampai satu pihak menyatakan A, sedangkan satu pihak B, padahal itu menanggapi satu kasus yang sama. Di sini kan sedang ada paradoks. Kubu FPI menyatakan anggota mereka diculik. Satu pihak lain, yakni polisi, menyatakan ada perlawanan sehingga dibalas”, ujar Dimiyati.

Dimiyati menegaskan

bahwa dalam merespons kejadian ini, kepolisian harus mengedepankan prinsip penegakan hukum yang humanis dan melaksanakan proses hukum dengan sebaik-baiknya, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Ia pun sedikit menyayangkan insiden penembakan yang seharusnya bisa dicegah.

“Penegak hukum harus melakukan duo process of law, tidak boleh melanggar hukum. Apalagi sampai ada kejadian penembakan yang berakibat pada korban tewas, bahkan hingga enam orang jumlahnya. Padahal, menembak itu sudah masuk kategori overmacht, keadaan memaksa. Tentunya, saya mengharapkan bahwa setiap proses hukum yang ada bisa dilakukan secara persuasif. Rule of law harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, gunakan hukum, tidak main tembak saja. Kita harus bisa menangani secara persuasif, polisi harus humanis”, tegas Anggota DPR

RI dari Dapil Banten ini.

Selain itu, menurutnya, pimpinan Polri perlu menginvestigasi kasus ini secara objektif dengan memeriksa seluruh aparat dan pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

“Pimpinan Polri harus bisa objektif. Kita juga harus memperhatikan dan menunjukkan rasa empati terhadap korban. Jangan sampai kejadian ini justru mencoreng nama baik kepolisian. Intinya, keadilan harus dijunjung tinggi di negara hukum”, ungkapnya.

Dimiyati pun menyatakan bahwa ia akan mendalami peristiwa penembakan ini bersama komisi III yang membidangi masalah hukum.

“Komisi III akan meminta penjelasan kepada Polri melalui RDP. Kita belum bisa mengambil kesimpulan karena keduanya saling klaim. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut terlebih dahulu dengan pembuktian di lapangan nantinya. Kita harus lihat apakah kejadiannya ini overmacht (sehingga penembakan dibenarkan) atau ada pelanggaran yang dilakukan polisi dalam penegakan hukum. Kami akan tanyakan itu ke kepolisian sebagai bagian dari fungsi pengawasan” pungkas Dimiyati.



DR. H. R. ACHMAD DIMIYATI NATAKUSUMAH, S.H.,M.H.

Anggota Komisi III DPR RI

Penegak hukum harus melakukan Duo process of law, tidak boleh melanggar hukum. Apalagi sampai ada kejadian penembakan yang berakibat pada korban tewas, bahkan hingga enam orang jumlahnya. Padahal, menembak itu sudah masuk kategori overmacht, keadaan memaksa.”

Terima Aduan Keluarga
Korban Insiden KM 50

Habib Aboe: Agendakan Pemanggilan Kapolri

KUTIPAN

Jakarta (10/12) -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboebakar Al-Habsy menindaklanjuti aduan dari Keluarga Korban Insiden KM 50.

Hal ini disampaikan Habib Aboe di Ruang Rapat Komisi III, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Hari ini kami di Komisi III menerima aduan dari Keluarga Korban Insiden KM 50, kenapa saya sebut insiden? karena ada dua versi cerita yang berkembang di publik. Pada prinsipnya kami sebagai anggota Komisi III akan menerima aduan ini dengan baik," kata Habib Aboe yang juga Sekjen DPP PKS.

Habib mengatakan, sebenarnya tewasnya enam orang anggota FPI seharusnya tidak perlu terjadi, hal ini sangat disesalkan, karena sebenarnya mereka adalah warga

Indonesia.

"Bukankah selama ini Kapolri selalu menyampaikan bahwa Polri menganut asas 'Salus Populi Suprema Lex Esto' atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi?," tegas Habib Aboe.

Habib juga menyatakan, bahwa langkah-langkah projusticia seperti yang diminta keluarga Korban dan para tokoh masyarakat dan berbagai elemen ini harus kita apresiasi dengan baik. Situasi ini jauh lebih baik dari apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika George Floyd tewas saat penangkapan.

"Tentu aspirasi yang

sedemikian besar ini tidak bisa kami diamkan saja, sebagai wakil rakyat tentunya kami harus menindaklanjuti dengan baik dan benar," jelas Habib Aboe yang juga ketua MKD.

Habib mengatakan, selama ini sudah mendengar aspirasi yang beredar luar di masyarakat, setidaknya lebih dari 55 pihak dan organisasi yang menuntut untuk dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta.

"Memang sampai saat ini masih banyak informasi yang simpang siur, tentunya hal ini perlu diklarifikasi dengan baik. Apakah memang persoalan protokol Kesehatan bisa berujung pada Tindakan represif seperti ini? itu semua nanti akan kita klarifikasi dengan Kapolri," jelas Habib Aboe.

Ia menambahkan, artinya ada kesadaran bersama untuk mengembalikan persoalan ini ke jalur hukum dan tidak mengambil Tindakan anarkis, karenanya itu patut diapresiasi.

"Tentunya Komisi III sebagai Mitra Kerja Kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini," tutup Habib Aboe.



HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Memang sampai saat ini masih banyak informasi yang simpang siur, tentunya hal ini perlu diklarifikasi dengan baik. Apakah memang persoalan protokol Kesehatan bisa berujung pada Tindakan represif seperti ini? itu semua nanti akan kita klarifikasi dengan Kapolri

Penembakan Polri dan FPI Adang Daradjatun Minta Polisi Selediki Kasus Secara Transparan dan Imparsial

KUTIPAN

Jakarta (8/12) Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta semua pihak untuk mengedepankan hukum dalam melihat tragedi penembakan yang terjadi antara Laskar Front Pembela Islam (FPI) dan pihak

Adang mencermati kasus yang berkembang secara faktual ada perbedaan informasi antara apa yang diungkapkan pihak kepolisian dengan FPI. Atas situasi tersebut harus ditempatkan secara proporsional dan Imparsial, agar tidak terjebak pada sengketa informasi yang menyesatkan hingga pada akhirnya dapat menyebabkan situasi yang lebih buruk.

“Adanya perbedaan penjelasan dari polda maupun FPI terkait kasus yang sebenarnya maka diperlukan suatu pem-

bentukan tim untuk meminta penjelasan dari Kapolri tentang kasus tersebut, jika masih ada kesimpangsiuran maka harus dibentuk tim pencari fakta yang independen” ujar Adang.

Anggota FPKS ini menyadari para penegak hukum harus konsisten dan bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang membahayakan orang lain. Namun demikian dalam proses penegakan hukum harus memperhatikan ketentuan dan prosedur penggunaan senjata yang telah ditetapkan.



Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

“Adanya perbedaan penjelasan dari polda maupun FPI terkait kasus yang sebenarnya maka diperlukan suatu pembentukan tim untuk meminta penjelasan dari Kapolri tentang kasus tersebut, jika masih ada kesimpangsiuran maka harus dibentuk tim pencari fakta yang independen”



***Mari Tetap
Patuhi Protokol
Kesehatan***

Harga Pangan Dunia Melonjak

Johan Ingatkan Pemerintah Siapkan Strategi Ketahanan Pangan

KUTIPAN

Jakarta (07/12) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan merespon laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang merilis terjadinya kenaikan harga pangan global.

Dalam laporan tersebut, terjadi kenaikan paling tajam sejak Juli 2012 terutama pada indeks harga minyak nabati, harga gula, harga sereal dan komoditas pangan lainnya yang berdampak memberikan tekanan ekstra kepada berbagai negara, khususnya negara yang sangat membutuhkan bantuan pangan dari luar untuk rakyat mereka.

Atas situasi ini, Johan mengingatkan Pemerintah agar cepat tanggap untuk memperbaiki ketahanan pangan kita, agar tidak terpengaruh signifikan terhadap eskalasi harga pangan dunia.

Politisi PKS ini berharap fenomena kenaikan harga pangan global saat ini bisa

segera direspon oleh pemerintah dengan cara menyiapkan strategi khusus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis produksi dalam negeri.

"Basis ketahanan pangan dari produksi dalam negeri ini harus digarisbawahi oleh pemerintah karena saat ini indeks ketahanan pangan kita sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kegiatan impor pangan," tutur Johan.

Saat ini, lanjut Johan, jadi lonjakan harga komoditas pangan karena terjadinya penurunan produksi di beberapa negara penghasil pangan.

"Maka sebagai negara agraris orientasi kita adalah mestinya memperkuat produksi

pangan dalam negeri sehingga bisa memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat", ujar Johan.

Wakil Rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini juga mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai terjadinya lonjakan harga pangan domestik yang tidak terkendali, akibat kenaikan harga pangan global saat ini.

"Saya minta pemerintah lebih cermat mengelola komoditas pangan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak agar tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan, manajemen harga dan stok pangan harus dikelola secara serius dan professional karena persoalan pangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional," papar Johan.

Selanjutnya Johan berpesan, kenaikan harga pangan saat ini semestinya dapat dijadikan momentum kebangkitan bagi kemandirian dan kedaulatan pangan nasional.

"Saya berharap pemerintah memiliki terobosan besar dalam sektor pangan untuk kemajuan Pertanian dan kesejahteraan petani di Indonesia," tegas Johan

Legislator dari dapil NTB 1 ini meminta pemerintah agar selalu memberikan prioritas dan perhatian serius terhadap persoalan pangan nasional,

Selengkapnya di fraksi.pks.id



H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Anggota Komisi III DPR RI

Saya minta pemerintah lebih cermat mengelola komoditas pangan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak agar tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan, manajemen harga dan stok pangan harus dikelola secara serius dan professional karena persoalan pangan sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional

Pupuk Bersubsidi Masih Dipersimpangan Jalan, Anggota DPR Minta Diluruskan

KUTIPAN

Jakarta (07/12) --- Anggota DPR RI Komisi IV yang ditunjuk Fraksi PKS sebagai Anggota Panja Pupuk Bersubsidi. Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, bahwa pupuk bersubsidi ini masih dipersimpangan jalan belum menemukan tujuannya.

Menurut Akmal, Anggaran Pupuk bersubsidi di APBN yang beberapa tahun terakhir telah menyamai Total APBN Kementerian Pertanian sudah puluhan tahun belum mewujudkan tujuannya yakni Swasembada Pangan.

"Pupuk subsidi ini pada tahun tertentu bahkan melebihi APBN Kementan. Contoh tahun 2020, Secara volume, alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Sedangkan APBN Kementan hanya belasan triliun", ucap Akmal.

Besarnya anggaran Pupuk subsidi ini menurut Akmal, seharusnya memiliki nilai strategis untuk menciptakan suasana kondusif bidang

pertanian kita.

"Tetapi bertahun-tahun berganti presiden dan berganti menteri pertanian, cita-cita bangsa ini mengembalikan kejayaannya dalam bidang agro tidak kunjung tiba", ungkapnya.

Swasembada, imbuhnya, masih dalam angan-angan bahkan kegaduhan impor pangan masih kerap terjadi.

"Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih dipersimpangan jalan, sehingga perlu diluruskan", kata Akmal.

Perlu diluruskannya persoalan pupuk bersubsidi menurut politisi PKS ini adalah, betapa besar anggaran yang digelontorkan Pemerintah bertahun-tahun tanpa henti untuk kegiatan ini, tapi percepatan

kemajuan pertanian kita masih belum sesuai harapan.

"Perlu evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaan nya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat", tegasnya.

Akmal melihat persoalan awal dimulai dari pendataan yang tidak akurat. Data ini kode awal dalam kerja implementasi pupuk subsidi ini sehingga semua teraudit dengan baik mulai dari perencanaan, produksi, distribusi hingga pengawasan.

"Celah penyimpangan pupuk subsidi ini masih sangat besar. Sulit ditemukan, tapi nyata ini sudah menyimpang. Bukti yang paling nyata ya puluhan tahun pupuk subsidi ini ada, tapi belum ketemu tujuannya, yakni Swasembada Pangan", tutur Akmal.

Legislator asal Sulawesi selatan II ini sangat berharap, panja pupuk bersubsidi yang akan segera digelar di Komisi IV DPR ini akan menemukan formula yang baik untuk



Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M.

Anggota Komisi IV DPR RI

Perlu evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaan nya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat

perbaikan.

Semua upaya harus memiliki landasan perbaikan dan pelayanan pada masyarakat. Sudah saatnya kita habisi para pemburu rente apapun kegiatannya.

"Semoga kita semua baik di DPR dan Pemerintah kompak

untuk memperbaiki pola pupuk subsidi yang angkanya sangat besar setiap tahunnya. Dengan begini, seharusnya tidak kurang dari 10 tahun bila semua komitmen, swasembada pangan di Indonesia ini tidak mustahil dapat diraih", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Alhamdulillah akun media sosial resmi FPKS DPR RI sudah terverifikasi sehingga memiliki tanda **CENTANG BIRU** ✓



“Semoga akun sosmed FPKS DPR RI dapat menjadi platform pesan perjuangan PKS di Parlemen yang semakin Informatif, aktual dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Terima Kasih atas seluruh dukungan rekan dan sahabat semua.”

Aleg PKS: Rencana Holding BUMN Sektor UMKM Harus Matang

KUTIPAN

Surabaya (04/12) -- Upaya menumbuhkan-kembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), UMKM memberikan sumbangsih terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 60% dan menyerap tenaga kerja sekitar 97%.

"Sebagai sektor yang telah berkontribusi begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM", kata Anggota Komisi VI Fraksi PKS Amin, Ak.

Salah satu upaya pengembangan UMKM yang dilakukan Pemerintah adalah dengan membentuk Holding BUMN UMKM. Sebagaimana diketahui Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN

sektor UMKM dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Amin berharap, rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Oleh karena itu, Pemerintah harus menyiapkannya secara matang, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan Holding BUMN secara jelas.

"Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik" tambah Amin.

Lebih lanjut Amin mengungkapkan, pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Namun demikian, jangan sampai keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan.

BRI misalnya, selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan kredit tanpa agunan (KTA) serta program kerakyatan lainnya, tapi BRI juga menggarap sektor korporasi. Yang realistis memang, BRI menjadi induk holdingnya. Namun ini juga perlu sinergi kuat agar performa Pegadaian dan PNM tidak menurun.

Selama ini PNM memiliki performa yang sangat baik, non performing loan (NPL) PNM pada bulan Mei 2020 sebesar 1,62%. Diperlukan konsolidasi terkait penataan struktur pinjaman, skema pengembalian, kriteria UMKM sasaran, dan lain-lain saat holding dibentuk. Tanpa konsolidasi yang kokoh, kata Amin, dikhawatirkan NPL PNM malah melonjak.

"Pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya," beber Kapoksi VI dari Fraksi PKS itu.

Kerjasama ketiga BUMN diharapkan menciptakan inovasi dan terobosan dalam menyalurkan bantuan

**AMIN AK, M.M**

Anggota Komisi VI DPR RI

Pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya

pemerintah untuk UMKM. Dari 64 juta UMKM, saat ini baru delapan juta atau 13% saja yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Menurut Amin, hadirnya Holding BUMN sektor UMKM ini dapat menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan baik, karena alasan belum bankable ataupun karena belum terintegrasi dengan teknologi digital.

"Ketiganya merupakan

BUMN sehat. PNM sangat kuat dalam menyalurkan kredit hingga ultra mikro, BRI mampu menjangkau hingga ke pelosok desa, dan Pegadaian punya skema serta sistem pengelolaan keuangan yang sudah teruji. Kolaborasi ketiganya bukan hanya mengembangkan UMKM namun akan melahirkan UMKM-UMKM baru," Kata Amin.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Anggota DPR Minta Symbol Negara Dahulu yang Divaksin, Agar Publik Percaya

KUTIPAN

Padang (09/12) — Legislator PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina mengingatkan kembali kepada Pemerintah, melalui kementerian BUMN agar dalam persoalan Vaksin jangan hanya jadi distributor saja.

Anggota DPR RI Komisi VI ketika Kunjungan Spesifik ke BUMN Farmasi, mendapat keterangan bahwa Biofarma berupaya memproduksi 140 juta bahan baku vaksin Covid-19.

Namun, Menurut anggota DPR Komisi VI ini, dalam waktu dekat ini Pemerintah sudah mendatangkan vaksin Sinovac dari Cina sebanyak 1,2 juta dosis. Perlu penjelasan yang masif bahwa vaksin ini aman, efektif ketika digunakan masyarakat luas.

"Vaksin ini kan reaksinya sangat beragam terhadap orang-orang. Itu domain praktis kesehatan yang mesti fokus mendalam dan mengawasi efektivitas vaksin ini. Namun sebagai anggota DPR yang bermitra dengan komisi VI,

mesti dipikirkan, kemampuan rakyat dalam membeli vaksin, skema harga dan lain-lain. Jika perlu, rakyat miskin dan seluruh peserta BPJS di gratiskan agar tidak menambah beban ekonomi rakyat. Untuk masyarakat yang memiliki kemampuan bayar, pemerintah tidak menetapkan tarif tinggi untuk vaksin mandiri. Pemerintah harus menetapkan harga yang terjangkau supaya distribusi vaksin jadi lebih merata", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini sangat berharap covid-19 ini selesai, dan salah satu upayanya adalah pemerintah secepat mungkin mendistribusikan vaksin agar upaya pengendalian Covid-19 lebih cepat.

"Namun stereotipe di masyarakat bahwa vaksin ini ada pembonceng yang harus ditepis sedemikian rupa dengan cara untuk rakyat miskin mesti gratis," tandas Nevi.

Nevi pun mendengar adanya penolakan dari sejumlah masyarakat terhadap vaksin. Untuk itu, menurut Nevi, simbol-simbol negara harus menjadi contoh lebih dahulu untuk divaksin.

"Presiden, para Menteri, Anggota DPR, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), sebagai simbol masyarakat harus lebih dulu divaksin. Supaya masyarakat merasa aman dan percaya terhadap vaksin," kata Nevi di Padang, Rabu (09/12).

Nevi menambahkan, Pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi terhadap orang-orang yang berdiri di garda terdepan dalam penanganan Covid. Seperti tenaga kesehatan, aparat keamanan, ASN, dan orang-orang yang terpapar Covid-19.

"Berkaitan dengan vaksin ini, saya berharap tidak ada



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar I

Berkaitan dengan vaksin ini, saya berharap tidak ada yang mendompleng dalam perburuan rente akibat vaksin ini. Semua pihak harus memikirkan Indonesia terlebih dahulu agar terbebas dari covid-19 dan beraktivitas normal seperti tidak terjadi pandemi

yang mendompleng dalam perburuan rente akibat vaksin ini. Semua pihak harus memikirkan Indonesia terlebih dahulu agar terbebas dari covid-19 dan beraktivitas normal

seperti tidak terjadi pandemi. Setiap orang yang mencoba memanipulasi vaksin ini harus ditindak tegas dan yang dapat melakukan ini adalah pemerintah", tutup Nevi

Jelang Libur Akhir Tahun

Politisi PKS: Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

KUTIPAN

Jakarta (12/12) --- Libur panjang akhir tahun 2020 diperkirakan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok

Meskipun dimasa pandemi harga kebutuhan pokok di tingkat petani cenderung turun, akan tetapi hal tersebut dapat memicu kenaikan harga karena pasokannya berkurang.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli mengatakan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dapat berakibat pada turunnya permintaan terhadap komoditas pertanian tertentu.

"Selain itu Bulan Desember yang sudah masuk musim pengujian dapat menyebabkan tingkat harga komoditas pertanian di tingkat petani menjadi rendah sehingga petani cenderung mengurangi

pasokannya. Ketika pasokan komoditas pertanian di tingkat petani berkurang, maka harga di tingkat masyarakat dapat menjadi tinggi," terang Rafli.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga kebutuhan pokok dalam kurun waktu 3-11 Desember 2020, setidaknya ada beberapa bahan kebutuhan pokok yang naik diantaranya telur ayam, daging sapi, cabai rawit, dan cabai merah.

"Meskipun komoditas lain seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng relatif stabil, akan tetapi kita tetap perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya kenaikan harga

kebutuhan pokok pada libur panjang akhir tahun 2020", ujar Rafly Kande, Anggota Komisi VI Fraksi PKS DPR RI, Sabtu, (12/12).

Dalam keterangan tertulisnya Rafli mengatakan adanya kemungkinan kenaikan harga kebutuhan pokok tentunya akan sangat memberatkan masyarakat.

"Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak pada lesunya perekonomian nasional dan daya beli masyarakat menurun, tentu akan menambah kesulitan masyarakat," paparnya.

Oleh karenanya, lanjut Rafli, Pemerintah harus dapat berupaya ekstra maksimal untuk dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pada libur panjang akhir tahun 2020.

"Pemerintah Pusat harus dapat melibatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan rantai pasoknya berjalan dengan baik, dan permasalahan di tingkat petani dapat segera diatasi. Sehingga upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok benar-benar dilakukan dari hulu hingga hilir", ujar Politisi PKS Asal Aceh

Rafli menambahkan koordinasi antar Kementerian teknis dan lembaga terkait juga harus dapat dilaksanakan.

"Upaya untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok tentunya harus diiringi dengan koordinasi antar Kementerian teknis dan



RAFLI
Anggota Komisi VI DPR RI

Pemerintah Pusat harus dapat melibatkan Pemerintah Daerah untuk memastikan rantai pasoknya berjalan dengan baik, dan permasalahan di tingkat petani dapat segera diatasi. Sehingga upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok benar-benar dilakukan dari hulu hingga hilir

lembaga terkait, agar kebijakan yang diambil dapat benar-benar tepat," ungkapnya.

"Jangan sampai antar Kementerian teknis dan

lembaga memiliki kebijakan yang berbeda, sehingga bisa merugikan masyarakat karena harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi", tutup Rafli

Anggota Komisi VII: Pemerintah Jangan Tergoda Kurangi Royalti Batu Bara

KUTIPAN

Jakarta (03/11) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menolak permintaan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) untuk mengurangi royalti penjualan ke negara.

Jakarta (03/11) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah menolak permintaan Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) untuk mengurangi royalti penjualan ke negara.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus patuh pada ketentuan Undang-Undang terkait penetapan besaran royalti penjualan bahan tambang. Jangan sampai Pemerintah tergoda untuk menynyuti dengan alasan apapun.

Sebelumnya APBI minta Pemerintah mengurangi nilai royalti yang berlaku lantaran harga pasaran batu bara anjlok.

Permintaan ini diajukan menyusul ditandatangani kesepakatan antara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dengan China Coal Transportation and Distribution Association (CCTDA), bulan lalu.

APBI dan CCTDA sepakat untuk meningkatkan ekspor batu bara dari Indonesia ke China untuk tahun 2021 selama tiga tahun. Kesepakatan tersebut bernilai US\$ 1,46 miliar atau senilai Rp 20,6 triliun untuk ekspor batu bara ke China sebesar 200 juta ton di 2021.

Atas kesepakatan kerjasama itu APBI minta pengurangan royalti karena

harga jual batu bara ke China sangat murah.

Menanggapi hal tersebut, Mulyanto menilai Pemerintah tidak bisa mengurangi royalti seenaknya. Ini adalah pendapatan Negara yang menjadi hak masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Mulyanto penentuan besaran persentase royalti termasuk harga batu bara acuan (HBA) didasarkan pada data empirik baik domestik maupun internasional. Bahkan HBA dihitung berdasarkan parameter harga domestik dan internasional yang fluktuatif secara bulanan.

Artinya HBA itu mengikuti perubahan harga pasar, sehingga tidak memberatkan pihak pembayar royalti namun cukup adil sebagai penerimaan Negara. Mengingat batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Selama ini penerimaan Negara dari sektor ini berjalan lancar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara pada 2018 mencapai angka Rp 50 triliun. Sekitar 80% dari angka itu berasal dari setoran pengusaha batu bara," jelas politisi PKS itu.

Tahun 2019, PNPB sektor mineral memenuhi target APBN sebesar Rp43,2 triliun, meski untuk target APBN 2020 mengalami penurunan sekitar 20% dengan realisasi sebesar



Dr. H. MULYANTO, M.Eng
Anggota Komisi VII DPR RI

Pemerintah harus patuh pada ketentuan Undang-Undang terkait penetapan besaran royalti penjualan bahan tambang. Jangan sampai Pemerintah tergoda untuk menyetujui dengan alasan apapun.

Rp 37 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Jadi, soal harga jual yang anjlok ini adalah murni mekanisme pasar, yang berbasis kesadaran bisnis pengusaha

dalam mendapatkan untung. Sehingga tidak adil kalau resiko bisnis tersebut dibebankan ke Negara melalui pengurangan penerimaan Negara," tegas Mulyanto.

Rofik Hananto Dorong BPH Migas Tingkatkan Peran

KUTIPAN

Purbalingga (06/12) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto menggelar Sosialisasi Fungsi, Tugas dan Capaian BPH Migas Tahun 2020

bertempat di Ballroom Braling Hotel, Purbalingga, Jawa Tengah (05/12/2020).

Kegiatan ini terselenggara bekerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi (BPH MIGAS).

Hadir sebagai narasumber Anggota DPR RI Komisi VII Rofik Hananto, Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjono, Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, Sales Branch Manager Rayon VI Tegal PT Pertamina: Handy Tri Husodo.

Acara tersebut dihadiri sekitar 150 orang Peserta yang berasal dari para pengusaha LPG-SPBU, dan para tokoh masyarakat.

Saryono Hadiwidjono selaku Komite BPH Migas dalam acara ini menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. Saryono mengatakan

BPH Migas merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan pendistribusian BBM dan Gas Bumi sesuai UU 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara itu, Rofik Hananto dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara secara resmi mengatakan Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi (BPH MIGAS) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BPH Migas sendiri memiliki fungsi untuk melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Rofik berharap dengan diadakannya kegiatan ini masyarakat lebih mengenal tugas dan fungsi BPH Migas dan mendorong BPH Migas untuk meningkatkan perannya "Dengan adanya kegiatan

Sosialisasi ini diharapkan masyarakat luas lebih mengenal tugas dan fungsi BPH Migas dan mendukung agar pendistribusian bahan bakar minyak khususnya BBM subsidi dapat tepat sasaran." Kata Rofik

"Kami mendorong BPH Migas untuk meningkatkan perannya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar ketersediaan dan distribusi BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah NKRI." Tambah Rofik

Pada acara ini Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro mengatakan BPH Migas selalu menjaga pendistribusian BBM khususnya JBT ke seluruh wilayah di Indonesia terjamin walaupun adanya pandemi



H. ROFIK HANANTO, S.E.

Anggota Komisi VII DPR RI

"Dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini diharapkan masyarakat luas lebih mengenal tugas dan fungsi BPH Migas dan mendukung agar pendistribusian bahan bakar minyak khususnya BBM subsidi dapat tepat sasaran.

Covid – 19.

"Kami (BPH Migas) senantiasa memastikan agar BBM untuk menunjang kegiatan setiap daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga dapat tersedia, dan kuota yang diberikan oleh BPH Migas dapat terukupi" Jelasnya.

Bambang juga melaporkan realisasi penyaluran BBM di Purbalingga.

"Realisasi Penyaluran BBM di Purbalingga, untuk JBT (Solar) Januari – Oktober tahun 2020 sebesar 15.453 KL atau 87% dari kuota 17.790 KL, sedangkan untuk JBKP (Premium) januari – september 2020 sebesar 2.880 KL atau 58% dari kuota 4.928 KL." Kata Bambang Utoro dalam paparannya Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

Aleg PKS Tegaskan Islam Tak Menyulitkan, Pergi Haji Hanya Bagi yang Mampu!

KUTIPAN

Bekasi (06/12) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, menghadiri Diskusi yang membahas Haji dan Umrah Bersama Maman Saepulloh,

Yang merupakan Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kemenag RI, di Hotel Avenzel Kota Bekasi pada (28/11/2020).

Dalam diskusi yang turut dihadiri oleh Perwakilan KBIHU, Yayasan Pendidikan sosial dan tokoh masyarakat di Kota Bekasi, Nur Azizah menegaskan bahwa dalam Islam, Allah tidak menyulitkan umatnya, terkait berhaji boleh pergi hanya apabila mampu.

Maman menuturkan bahwa di masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 terjadi penundaan keberangkatan jemaah haji Indonesia dan itu berimplikasi pada semakin panjangnya antrian haji, sementara yang mendaftar antrian terus bertambah.

"Di beberapa daerah di Indonesia antriannya bahkan ada yang mencapai 40-an tahun. Tidak hanya Indonesia

saja keberangkatan Jemaah Haji ditunda, tapi hampir dari seluruh dunia," ungkap Maman.

Sementara pada kesempatan tersebut, Nur Azizah menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dan terburu-buru mendaftar, karena pada dasarnya pergi Haji adalah panggilan dari Allah SWT.

Nur Azizah menambahkan, panjangnya antrian berhaji di Indonesia karena antusias pendaftar yang begitu besar, hal ini tidak berimbang dengan kapasitas yang tersedia untuk jamaah haji di Makkah.

"Beberapa titik lokasi ibadah Haji cukup terbatas seperti di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Di ketiga tempat tersebut setiap tahunnya selalu dipadati oleh Jamaah Haji asal Indonesia dengan kondisi yang cukup padat dan terkesan kumuh. Sehingga pemerintah Arab Saudi menerapkan

pembatasan jumlahnya demi kenyamanan dan agar Jemaah Haji yang lain juga dapat memperoleh hak nya untuk menjalankan ibadah dengan nyaman," ungkapnya.

Menurut Nur Azizah salah satu parameter kemampuan dalam berhaji selain memiliki bekal keilmuan yang cukup, adalah kemampuan secara finansial.

"Di Indonesia kita baru bisa daftar antrian haji dengan menyertakan uang sejumlah 25 juta saat mendaftar, dan 10 juta dibayar saat pelunasan, total 35 juta, artinya jika belum ada kesanggupan untuk menyertakan uang sejumlah itu, dia belum istito'ah, belum ada kewajiban berhaji. Jangan sampai umat muslim Indonesia memaksakan diri mendaftar haji hingga terpaksa berhutang. Pastikan ia memang mampu secara finansial", jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menegaskan bahwa masyarakat yang saat ini sudah mendaftar tidak perlu khawatir dengan uang yang telah disetorkan, karena pada dasarnya telah dikelola dengan baik untuk kemashatan.

Nur Azizah juga



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

Jika memang Allah sudah berkehendak akan ada jalannya entah itu melalui jalur reguler ataupun ONH Plus yang lebih cepat antriannya. Dalam hal ini aturan Islam tidak menyusahkan, tidak ada kewajiban berhaji bagi mereka yang belum memiliki kesanggupan finansial

menjelaskan bahwa sebetulnya jika masyarakat belum memiliki kelebihan uang diatas 35 juta artinya ia belum memiliki beban kewajiban Haji.

Masyarakat dihimbau untuk lebih tenang dan tidak perlu panik dan tergesa-gesa mendaftar haji, apalagi tergoda iming-iming pihak tertentu untuk berhutang sejumlah uang untuk mendapatkan nomor urut pendaftaran dengan aneka

resiko transaksinya.

"Pergi Haji itu panggilan Allah, tidak perlu khawatir dengan masalah finansial yang dirasa belum mencukupi, jangan memaksakan diri. Jika memang Allah sudah berkehendak akan ada jalannya entah itu melalui jalur reguler ataupun ONH Plus yang lebih cepat antriannya.

Selengkapnya kunjungi Fraksi.pks.id

Vaksin Sinovac Datang

Mufida **Pertanyakan** Hasil Uji Klinis, Izin Edar dan Sertifikat Halal

KUTIPAN

Jakarta (07/12) --- Pemerintah mengumumkan sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin Covid-19 dari Sinovac, China.

Kedatangan vaksin Sinovac ini dilakukan secara terbuka dengan melakukan live streaming dan disaksikan ratusan ribu masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa vaksin Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III. Selain itu, seluruh vaksin Covid-19 yang nantinya beredar di Indonesia wajib mengantongi izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorisation (EUA) sudah terpenuhi.

Mufida menyebutkan, semangat dan optimisme dalam perang melawan pandemi memang perlu digaungkan. Catatannya, ujar dia, informasi yang disampaikan harus lengkap, jelas dan valid sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

"Kami saja di Komisi IX resah karena belum tahu pasti hasil uji klinis, izin edar BPOM dan sertifikasi halalnya bagaimana?" ungkap dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Mufida menyayangkan cara komunikasi pemerintah sejak awal pandemi yang sering sepotong-sepotong dan kurang komprehensif. Ia menyebut pemerintah seharusnya belajar dari masukan dan catatan dari banyak pihak.

"Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai dimana izin edar dari BPOM dan sertifikasi Halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini," sebut Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri

ini.

Selain cara komunikasi yang tidak utuh, Mufida juga menyoroti terbukanya opsi vaksinasi dilakukan oleh BUMN sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menkes tentang penetapan jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi coronavirus.

Mufida menyebut ada klausul vaksinasi mandiri bisa dilakukan oleh BUMN. Sebaiknya klausul ini harus disertai dengan mekanisme atau aturan bahwa pengelolaan vaksin ini tidak dengan sistem pengelolaan 'bisnis as usual'. Ia menekankan rakyat sedang dalam situasi berat saat ini.

"Jangan terjadi perang harga yang kemudian justru lebih kuat motif ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi," sebut dia.

Secara ideal, seharusnya vaksinasi dalam rangka pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) merupakan kewajiban negara, sebab kekebalan kelompok ini bagian dari strategi penanganan bencana untuk mencapai herd immunity.



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Kedatangan vaksin Sinovac ini perlu ditambahkan informasi bagaimana hasil uji klinis tahap III dan sudah sampai dimana izin edar dari BPOM dan sertifikasi Halal. Saya lihat belum ada narasi itu dalam informasi kedatangan vaksin saat ini

Pemerintah Salurkan Bantuan Bencana

Netty: Pastikan Sesuai Prokes Agar Tak Muncul Klaster Pengungsian

KUTIPAN

Jakarta (06/12) — Pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat korban bencana erupsi gunung berapi dan banjir bandang di beberapa daerah.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani meminta Pemerintah agar memastikan proses evakuasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

"Meskipun kondisinya crowded, evakuasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi harus tetap menaati protokol kesehatan. Penyaluran bantuan yang tidak taat prokes berisiko memperparah kondisi kesehatan masyarakat dan menambah jumlah kasus Covid-19 di tanah air," katanya dalam keterangan media, Minggu, (06/12).

Menurut Netty, prokes di wilayah bencana, semisal di tempat pengungsian, dapur

umum dan posko bencana harus diterapkan secara disiplin.

"Kita tidak ingin muncul klaster pengungsian yang akan menyebabkan lonjakan kasus dan menambah beban bagi para pengungsi," katanya.

Netty juga meminta Pemerintah agar memastikan kecukupan kebutuhan para pengungsi, baik korban banjir dan longsor di Banten dan Garut, Jawa Barat mau pun korban erupsi Merapi - Semeru di Jawa Tengah.

"Kebutuhan para pengungsi harus tercukupi, baik pada saat di lokasi pengungsian mau pun setelah kembali ke rumah. Pemerintah harus mendata apa saja kebutuhan masyarakat, terutama sarana

prasarana untuk menjalankan prokes sehari-hari," ungkapnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP Bidang Kesos, Netty mengimbau struktur dan kader PKS agar terlibat aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

"Kader PKS harus siap siaga melindungi keluarga dan melayani masyarakat terdampak. Pastikan kader PKS hadir sebagai pelayan rakyat di garda depan. Logo baru PKS berwarna oranye identik dengan aksi kerelawanan. Mari kita optimalkan pusat khidmat PKS dan konsolidasikan gerakan tanggap bencana di seluruh Indonesia," tandasnya.



Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

Meskipun kondisinya crowded, evakuasi dan penyaluran bantuan kepada pengungsi harus tetap menaati protokol kesehatan. Penyaluran bantuan yang tidak taat prokes berisiko memperparah kondisi kesehatan masyarakat dan menambah jumlah kasus Covid-19 di tanah air,

BABAK FINAL

Persembahkan **Fraksi PKS DPR RI** Dalam Rangka Peringatan Hari Santri Nasional 2020 dan Peringatan 16 Tahun Fraksi PKS DPR RI



16TH
Fraksi PKS
Majelis & Majelis
Konsultatif



مسابقة قراءة الكتاب فتح المعين

LOMBA BACA TV KITAB KUNING TINGKAT NASIONAL 2020



SAKSIKAN LIVE
SELASA 22 DESEMBER 2020
JAM 10.00 WIB

BERSAMA
DEWAN JURI

KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.

(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)

KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA

(Ketua Umum MAPADI)

Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz

(Ketua BP-DPP PKS)





Hari Penyandang Disabilitas

Sekolah 'Semi' Inklusi Tertatih Wujudkan Hak Pendidikan

Jakarta (03/12) ---
Tepat di Hari Pe-
nyandang Disabilitas
Internasional,
3 Desember 2020,

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar 206 Putraco Indah yang memiliki sekitar 75% murid berstatus penyandang disabilitas.

"Kami sesungguhnya sekolah umum, bukan sekolah inklusi, tetapi memang sejak awal kami tidak pernah menolak bila ada calon peserta didik berkebutuhan khusus yang berminat sekolah di tempat kami," jelas Kepala Sekolah SD Putraco Indah, Agus Nurjaman

Karena itulah meski umumnya rata-rata sekolah

umum hanya menerima antara 1 sampai 5 peserta didik penyandang disabilitas di dalam satu kelas yang berisi 24 siswa, SD Putraco Indah di Kota Bandung ini justru memiliki hampir separuh siswa penyandang disabilitas dalam satu kelas.

"Kelas satu tahun ini contohnya memiliki 7 peserta didik berkebutuhan khusus dari total 18 siswa," kata Agus lagi.

Dalam pertemuan dengan Ledia, kepala sekolah dan juga guru-guru SD Putraco Indah membuka dialog dengan menyampaikan berbagai pengalaman dan curahan hati mereka selama menjadi pendidik di sekolah yang dapat dikatakan sebagai sekolah 'semi' inklusif ini. Diantaranya terkait sarana prasarana yang belum memadai, dana operasional sekolah yang sangat minim hingga persoalan kesejahteraan guru.

Dari total 116 siswa di Putraco Indah, mayoritas dari kalangan tidak mampu, sehingga sekolah tidak bisa mengandalkan dana SPP. Dana BOS yang diterima juga sangat minim untuk bisa mensupport kebutuhan operasional sekolah termasuk perawatan bangunan sekolah yang banyak membutuhkan perbaikan di sana sini. Sementara dari 12 guru yang ada hanya 2 guru berstatus PNS, plus 1 Kepala Sekolah.



"Dengan jumlah siswa didik berkebutuhan khusus yang sangat banyak, kami juga tidak memiliki sarana pendukung yang memadai seperti alat bantu pun ruang khusus untuk menangani bila ada siswa yang sedang ada masalah, seperti bila sedang tantrum." Jelas salah seorang guru yang sudah 15 tahun mengabdikan di sana.

Dalam pertemuan tersebut Ledia yang juga mantan Ketua Panitia RUU Penyandang Disabilitas mengaku telah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk secara lebih sungguh-sungguh mewujudkan hak pendidikan bagi para penyandang disabilitas diantaranya lewat dukungan bagi sekolah-sekolah inklusi maupun non inklusi yang memiliki siswa penyandang disabilitas.

"Kami akan terus mendorong agar sekolah dan juga para siswa penyandang disabilitas mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah." Kata Ledia.

Salah satu yang disinggung Ledia adalah terkait dana

BOS dimana menurutnya pemerintah perlu membuat pertimbangan agar dana yang dianggarkan tidak sama antara sekolah yang memiliki siswa dengan penyandang disabilitas dan sekolah tanpa siswa dengan penyandang disabilitas.

"Sebab penyandang disabilitas secara umum memang memerlukan biaya hidup termasuk biaya pendidikan yang lebih tinggi dibanding mereka yang bukan penyandang disabilitas. Karena mereka memang memerlukan beberapa alat bantu khusus atau apa yang disebut dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai akomodasi yang layak," ungkap Ledia.

Selain itu, Ledia juga menjanjikan untuk menyampaikan berbagai masukan, keluhan dan permohonan pihak sekolah kepada pihak terkait yang berkesesuaian dengan tupoksinya sebagai anggota DPR RI.

"Kami akan terus mendorong agar sekolah dan juga para siswa penyandang disabilitas mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah."

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Komisi X DPR RI

Fikri Minta Pemerintah Inventaris Permasalahan Menghadapi Sekolah Tatap Muka

KUTIPAN

Semarang (04/12) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah membuat inventaris masalah dan evaluasi atas proses pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai,

serta simulasi dalam rangka persiapan belajar tatap muka secara nasional bulan depan (Januari 2021).

“Banyak hal teknis dan detail kecil bagaimana proses akan berlangsung nantinya, belum lagi soal rasio jumlah kelas, kapasitas guru, hingga kondisi pandemi yang masih tidak menentu,” katanya dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Jumat (4/12).

Menurut Fikri, penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Keselamatan peserta didik dan guru harus tetap prioritas, maka mestinya ada analisa resiko, bukan untuk

menakuti, melainkan dicari respon antisipasi yang tepat dan cepat” ujarnya.

Melanjutkan hal itu, Politisi PKS ini meminta pemerintah, khususnya Kemendikbud melakukan inventarisasi masalah jika seluruh pemerintah daerah membuka semua sekolah di bawahnya.

“Dari mulai yang kecil dan teknis, seperti bagaimana jam masuk dan pulang sekolah anak-anak agar tidak berkerumun, termasuk saat istirahat dan pergantian jam pelajaran,” katanya.

Selain itu, Fikri mengingatkan soal rasio rombongan belajar (rombel) terhadap jumlah ruang kelas secara nasional, yang angkanya rata-rata di atas 1. Artinya

jumlah ruang kelas lebih sedikit daripada jumlah rombel.

“Tetapi ini di masa normal, sedangkan aturannya di masa pandemi, kapasitas satu ruang kelas maksimal 50 persen diisi,” katanya.

Sehingga, untuk mengantisipasi kekurangan ruang kelas, harus dibuat shift (pembagian jam masuk siswa).

“Nah, masalah lain muncul, guru akan dituntut jam mengajar lebih, lantas bagaimana dengan sekolah yang gurunya banyak rangkap mengajar, alias kekurangan guru?” tanya Fikri.

Fikri juga meminta inventarisasi masalah termasuk evaluasi kegiatan belajar tatap muka yang sudah berjalan di beberapa daerah sejak Agustus.

“Misalnya soal laporan timbulnya klaster baru covid di sekolah-sekolah dan respon penanganannya,” imbuh dia.

Sebelumnya, Keputusan Bersama empat Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 03/KB/2020, No. 612 tahun



Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Keselamatan peserta didik dan guru harus tetap prioritas, maka mestinya ada analisa resiko, bukan untuk menakuti, melainkan dicari respon antisipasi yang tepat dan cepat”

2020, No. HK.01.08/Menkes/2020, No. 119/4536/SJ tentang revisi tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi menyebutkan dimulainya pembelajaran tatap muka secara bertahap di seluruh Indonesia.

Kemudian, pemerintah mengevaluasi SKB 4 Menteri tersebut, dan hasilnya, mulai Januari 2021, sekolah di seluruh Indonesia diperbolehkan untuk kembali mengadakan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Aleg PKS Nilai Pemerintah Perlu Kerja Keras Hadapi Ekonomi 2021

KUTIPAN

Jakarta (04/12) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly menilai Pemerintah harus melakukan kerja lebih keras lagi dalam menghadapi tantangan perekonomian di tahun 2021.

Menurut Junaidi, penanganan pandemi covid-19 yang maksimal menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi.

"Pemulihan ekonomi tahun depan akan terkendala jika penanganan pandemi covid-19 belum membaik, pemerintah perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan yang sudah ditarget," ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Jum'at (04/12)

Aleg Fraksi PKS ini

melanjutkan, perbaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 urgensi untuk dilakukan, dengan perbaikan tersebut akan menguatkan harapan masyarakat pasca keterpurukan sepanjang tahun ini.

Junaidi mengatakan bahwa jika tidak ada inovasi kebijakan yang mendorong reformasi dan transformasi ekonomi, maka pemulihan ekonomi akan semakin berat.

Oleh karena itu, pemulihan ekonomi tahun depan masih bergantung pada seberapa besar efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

Lebih lanjut, Legislator dari Dapil Lampung II ini mengatakan pemerintah harus benar-benar responsif dalam memitigasi dampak pandemi termasuk didalamnya memberikan kepastian terhadap keadilan dan pemerataan distribusi program bantuan.



Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Pemulihan ekonomi tahun depan akan terkendala jika penanganan pandemi covid-19 belum membaik, pemerintah perlu kerja keras untuk mencapai pertumbuhan yang sudah ditarget. perbaikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 urgensi untuk dilakukan, dengan perbaikan tersebut akan menguatkan harapan masyarakat pasca keterpurukan sepanjang tahun ini.

Kunjungan Kerja Spesifik

Anis Minta BI Tingkatkan Kualitas SDM Pelaku UMKM

KUTIPAN

Jakarta (05/12) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang telah bertindak nyata membantu Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat yang terdampak covid 19.

"Penting bagi kita semua untuk fokus kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah situasi pandemi covid 19 yang belum berakhir," ungkapnya.

Anis yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang ekonomi dan Keuangan ini menambahkan, seiring dengan banyaknya UMKM yang baru tumbuh di berbagai wilayah, terutama dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, sebagian besarnya adalah usaha mikro dan ultra mikro, sehingga mereka menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga perbankan.

"Sedangkan, pemerintah mengururkan KUR atau BI mengeluarkan permodalan, yang seluruhnya melalui perbankan. Maka, perlu adanya solusi tepat yang dihadirkan oleh pemerintah dan BI dalam hal ini," tegasnya.

Anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI Jakarta 1 wilayah Jakarta Timur ini juga menyampaikan terkait dengan digitalisasi UMKM.

"Belum banyak UMKM yang masuk platform digital, data dari Kementerian Koperasi, dari 64 juta UMKM, yang masuk platform digital baru

sekitar 8 juta atau 13%. Sehingga digital UMKM, menurut saya tidak bisa terburu-buru, menjangkau akses perbankan saja mereka masih kesulitan, apalagi digitalisasi," terang Anis.

Doktor Ekonomi Syariah ini menjelaskan bahwa UMKM itu tidak bisa dipisahkan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata SDM UMKM adalah lulusan SD dan SMP, kapasitas SDM inilah yang membuat UMKM sulit berkembang.

"Sedangkan 99,9% UMKM kita menopang ekonomi nasional dan korporasi hanya 0,01%, tapi kalau kapasitas SDMya masih rendah, tentu akan sulit mendongkrak UMKM berkontribusi pada perekonomian nasional." paparnya.

"Maka saya mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk memberikan bantuan program pendidikan formal dan informal terkait ekonomi dan peningkatan SDM, yang akan berdampak kepada peningkatan UMKM, sehingga mampu bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi di dalam negeri bahkan bisa go internasional," tandas Anis mengakhiri.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.**

Anggota Komisi XI DPR RI

Saya mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk memberikan bantuan program pendidikan formal dan informal terkait ekonomi dan peningkatan SDM, yang akan berdampak kepada peningkatan UMKM, sehingga mampu bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi di dalam negeri bahkan bisa go internasional."

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Dianggap Penting
bagi Perekonomian

Fraksi PKS **Setujui** RUU tentang Jalan di Sidang Paripurna

KUTIPAN

Jakarta (07/12) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (07/12),

menyoroti isu yang paling sensitif bagi rakyat dan menjadi perhatian penting yakni ketersediaan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing agar roda perekonomian bisa berputar dengan baik.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, yang mewakili Fraksi PKS, dalam Sidang Paripurna menyampaik-

kan pandangannya berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"Pertama, Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang ini diperlukan dikarenakan berbagai perkembangan yang terjadi sejak UU tentang Jalan ditetapkan pada

tahun 2004. Salah satu hal yang mengemuka adalah adanya perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang jalan di perdesaan seperti yang diatur dibanyak tempat pada RUU Perubahan ini", terang pria yang akrab disapa SJP ini.

Kedua, lanjut Suryadi, Fraksi PKS berpendapat diperlukan pengaturan yang cermat dan sangat berhati-hati dalam masalah penyerahan wewenang dan pengambilalihan pelaksanaan penyelenggaraan Jalan dari Pemerintah Desa/Kota/Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat agar tidak terjadi beban yang berlebihan disalahsatu pihak dan melepaskan tanggung jawab dipihak yang lain.

"Proses penyerahan wewenang dan pengambilalihan penyelenggaraan Jalan juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah agar tidak terjadi pertentangan. Penetapan

Salah satu hal yang mengemuka adalah adanya perkembangan kebijakan negara yang memberi ruang kekuasaan dan keuangan lebih besar kepada pemerintah desa, sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang jalan di perdesaan seperti yang diatur dibanyak tempat pada RUU Perubahan ini"



Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS **Suryadi Jaya Permana** menyerahkan Pandangan Mini Fraksi PKS tentang RUU Jalan kepada pimpinan rapat pada Rapat Paripurna Senin (07/12)

kriteria dan prosedur harus menjadi perhatian yang sangat serius agar klausul yang sebenarnya bermaksud baik ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah," terangnya.

Ketiga, lanjut SJP, Fraksi PKS berpendapat berkaitan dengan jalan tol, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: Penyesuaian tarif tol harus memasukkan unsur pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat sebagai insentif bagi masyarakat dan dunia industri yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi secara umum.

"Perlu ada batasan maksimal masa konsesi secara

jelas agar tidak terjadi pengusahaan yang sangat panjang pada aset yang sangat potensial dan strategis bagi pembangunan. Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat roda perekonomian masyarakat", ujar Suryadi.

Keempat, imbuh Suryadi, Fraksi PKS berpendapat diperlukan pengarusutamaan penyandang disabilitas dengan memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas pada Ruang Manfaat Jalan terutama jalan-jalan dimana terdapat kantor-kantor/fasilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan UU 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selengkapnya di fraksi.pks.id



Sidang Paripurna DPR RI

Aleg PKS: Berikan Sejumlah Catatan Pada Pemerintah

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI **Ledia Hanifa** (Kanan) Memberikan keterangan pers sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR Senin 7 Desember 2020.

KUTIPAN

Jakarta (07/12) -- Anggota FPKS DPR RI Dapil Jawa Barat I Ledia Hanifa menyampaikan dua catatan penting untuk DPR dan Pemerintah.

Hal ini disampaikan Ledia pada Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Jakarta, Senin (07/12/2020).

Menanggapi pernyataan pemerintah yang telah mengumumkan bahwa sudah mendapatkan 1,2 jt vaksin covid-19 dari sinovac Cina. Kedatangan vaksin ini dilakukan secara terbuka dan melakukan live streaming serta disaksikan ratusan ribu masyarakat.

"Kami berharap agar informasi tentang vaksin tidak sepotong-potong, akan tetapi komprehensif. Kita juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan vaksin ini sebagai lahan bisnis," tegas Ledia.

Ledia juga menambahkan, agar informasi kedatangan vaksin diikuti dengan informasi hasil uji klinis tahap tiga dan izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat emergency use authorization dan sertifikat halal.

"Semangat dan optimisme kita dalam perang melawan pandemi ini memang perlu

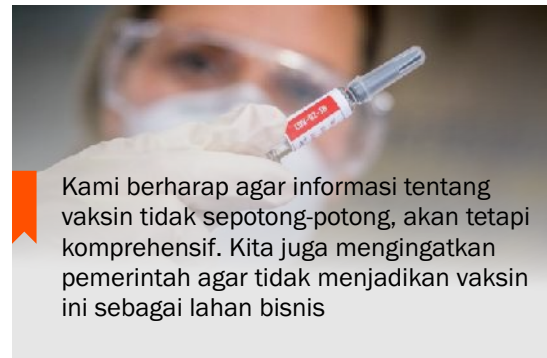
digaungkan, namun agar keselamatan rakyat juga menjadi hal yang utama. Agar informasi yang disampaikan komprehensif, jelas dan valid," kata Ledia.

Dilain sisi, Ledia menyatakan, bahwa dalam makna hari disabilitas Internasional. Sudah didukung oleh UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, akan tetapi ada sejumlah hal yang belum diimplementasikan.

Amanat dari UU tersebut diantaranya adalah tentang

Komite Nasional Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas tingkat Kota Kabupaten, berisi untuk membantu mendampingi siswa penyandang disabilitas dan orang tua dari penyandang disabilitas serta unit layanan disabilitas tentang ketenagakerjaan sehingga para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya dalam memperoleh pekerjaan.

"Hal tersebut menjadi catatan bagi kami karena sudah 3,5 tahun Undang-Undang ini diundangkan dan tentu kami berharap pada tahun yang akan datang sudah dilakukan dengan lebih baik sehingga hak-hak saudara kita penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia bisa menikmati kehidupan yang lebih baik sebagai bangsa Indonesia," tutup Ledia.



Kami berharap agar informasi tentang vaksin tidak sepotong-potong, akan tetapi komprehensif. Kita juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan vaksin ini sebagai lahan bisnis

RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2020-2021



H. ANSORY SIREGAR, Lc
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

INTERUPSI

Aleg PKS: **Batalan** Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Buat Orang Fakir Miskin!

“Saya akan terus ulangi pembahasan ini! Bahwa menteri siapapun, baik itu PMK atau apapun, tidak bisa melangkahi ayat ini untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan. Fakir Miskin itu tidak mampu, apalagi pandemi seperti sekarang ini, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 ayat 1 bahwa Dana APBN dipertanggung jawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 28 H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28 H Ayat 3 bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sidang Paripurna DPR RI

Aleg FPKS: **Batal**kan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Buat Orang Fakir Miskin !

KUTIPAN

Hasil rapat Komisi IX mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait, guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi PBPJ dan BP atau orang miskin kelas 3 sehingga peserta tetap membayar Rp. 25.500.

Jakarta (12/12) – Anggota FPKS DPR RI Dapil Sumatera Utara III, Anshory Siregar memberikan kritik dan sarannya kepada Pemerintah. Hal ini disampaikan Anshory pada Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

"Saya tidak akan bosan dan tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS kesehatan bagi fakir miskin ini," tegas Anshory.

Ia mengatakan, hal tersebut dikarenakan pada paripurna tanggal 16 Juli 2020 Pimpinan DPR berjanji akan membahas kembali iuran BPJS

Kesehatan, khususnya kenaikan iuran BPJS kelas 3 mandiri atau masyarakat yang fakir miskin PBPJ (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) akan tetapi pembahasan tersebut tak kunjung dibahas.

"Walaupun langit runtuh, saya akan terus menyuarakan hak-hak orang fakir miskin ini," kata Anshory.

Ia menambahkan, bahwa hasil rapat Komisi IX mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait, guna mempertimbangkan relaksasi iuran bagi PBPJ dan BP atau

orang miskin kelas 3 sehingga peserta tetap membayar Rp. 25.500.

"Saya akan terus ulang pembahasan ini ! Bahwa menteri siapapun, baik itu PMK atau apapun, tidak bisa melangkahi ayat ini untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan. Fakir Miskin itu tidak mampu, apalagi pandemi seperti sekarang ini," jelas Anshory

Hal tersebut, Ia nyatakan seperti yang termaktub dalam UUD 1945 ayat 1 bahwa Dana APBN dipertanggung jawabkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 28 H Ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasal 28 H Ayat 3 bahwa setiap orang berhak miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

"Perpres 64 masih cacat dan harus ditinjau kembali, khususnya tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan," tutup Anshory.

**H. ANSHORY SIREGAR, Lc**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

"Saya akan terus ulang pembahasan ini! Bahwa menteri siapapun, baik itu PMK atau apapun, tidak bisa melangkahi ayat ini untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan. Fakir Miskin itu tidak mampu, apalagi pandemi seperti sekarang ini,"

Aleg PKS Minta Pemerintah **Batalkan Calling Visa untuk Israel**

KUTIPAN

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan pelayanan calling visa untuk Israel, yang notabene adalah penjajah Palestina. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat, (11/12).

"Terkait dengan calling visa untuk Israel, saya kira pemerintah perlu hati-hati untuk memberikan calling visa ini. Karena Israel, berdasar rekam sejarahnya, kalau mengarah pada normalisasi, diajak damai, mereka malah semakin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah", ujar Sukamta.

Menurutnya, pemerintah perlu untuk mencabut kebijakan tersebut dan menutup ruang diplomasi dengan Israel.

"Nah, tolong pemerintah Indonesia ini jangan berkompromi, jangan mengarah pada pendekatan bertemen dengan Israel. Karena justru seharusnya Israel ini diisolasi,

bukan diberikan ruang untuk menjadi teman", ucap anggota DPR dari Dapil Yogyakarta ini.

Selain itu, menurut Sukamta, isolasi dan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

"Amanat konstitusi kita adalah mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, dan memperjuangkan perdamaian abadi berdasar kemerdekaan. Maka kami berharap, sikap pemerintah Indonesia adalah terus konsisten menghapuskan penjajahan di atas dunia dan membela negara yg masih dijajah. Satu-satunya negara yang terjajah saat ini adalah Palestina, dan Israel adalah penjajahnya. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah tidak kompromi, walaupun dengan alasan utk mencari investasi atau apapun", pungkas Sukamta.



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

Amanat konstitusi kita adalah mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa, dan memperjuangkan perdamaian abadi berdasar kemerdekaan. Maka kami berharap, sikap pemerintah Indonesia adalah terus konsisten menghapuskan penjajahan di atas dunia dan membela negara yg masih dijajah. Satu-satunya negara yang terjajah saat ini adalah Palestina, dan Israel adalah penjajahnya. Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah tidak kompromi, walaupun dengan alasan utk mencari investasi atau apapun

RAPAT PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021



H. SUKAMTA, Ph.D.

Anggota Komisi I DPR RI

INTERUPSI

Aleg PKS Minta Pemerintah **Batalkan** Calling Visa untuk Israel

Terkait dengan calling visa untuk Israel, saya kira pemerintah perlu hati-hati untuk memberikan calling visa ini. Karena Israel, berdasar rekam sejarahnya, kalau mengarah pada normalisasi, diajak damai, mereka malah semakin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah Nah, tolong pemerintah Indonesia ini jangan berkompromi, jangan mengarah pada pendekatan bertemen dengan Israel. Karena justru seharusnya Israel ini diisolasi, bukan diberikan ruang untuk menjadi teman.



Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

KUTIPAN

Dorong Wisata Air Sungai
Bengewang Solo

Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Serahkan 10 Kano Untuk Relawan KARSA

“Mudah-mudahan kedepan kalo ini sudah dibersihkan lalu juga dari sisi pengelolaan aspek safetynya itu sudah baik, kita berharap dari DPUPR bisa mendorong ini menjadi wisata sungai, karena ini potensi cukup lumayan, kita punya 10 kano saja sudah dilihat masyarakat, mereka sangat antusias, rupanya ini menjadi suatu yang menarik di Solo, karena selama ini belum ada.

Dorong Wisata Air Sungai Bengawan Solo

Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Kharis Serahkan 10 Kano Untuk Relawan KARSA

KUTIPAN

Surakarta (07/12) — Sebanyak 10 bantuan perahu kano diserahkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada korps Relawan Peduli Sungai Solo Raya (KARSA), Minggu (6/12/20), guna mendukung kinerja relawan sungai.

Penyerahan bantuan secara simbolis berupa dayung dan kano, diserahkan langsung Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada ketua KARSA Sabar Gorky di Bendungan Tirtanadi Solo.

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan Bendungan Tirtanadi Solo memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi lokasi pariwisata. hal itu sudah didukung dari sisi infrastruktur yang tertata dengan baik. Hanya saja saat ini pemanfaatan sektor pariwisata hanya dari sisi sekitar bendungan, dan belum menyentuh sisi aliran sungai.

“Ini bendungan sudah bagus sekali dibangun peme-

rintah, dan tinggal bagaimana meramaikan, tapi memang ini belum dijadikan tempat wisata untuk di sungainya, kalo di sekitarnya sudah,” jelas Haris kepada RRI.

Padahal, lanjut Kharis sapaan akrabnya, pemanfaatan aliran sungai untuk pariwisata dengan menggunakan perahu kano, bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk sektor wisata air di Kota Solo. Sehingga diharapkan, kedepan, pemangku kebijakan setempat dapat mendorong adanya wisata air perahu kano.

“Mudah-mudahan kedepan kalo ini sudah dibersihkan lalu juga dari sisi pengelolaan aspek safetynya itu sudah baik, kita berharap

dari DPUPR bisa mendorong ini menjadi wisata sungai, karena ini potensi cukup lumayan, kita punya 10 kano saja sudah dilihat masyarakat, mereka sangat antusias, rupanya ini menjadi suatu yang menarik di Solo, karena selama ini belum ada,” katanya.

Selain itu, Kharis mengatakan, pemberian kano kepada relawan itu, diharapkan dapat membantu kinerja relawan saat melakukan pembersihan sungai maupun saat kondisi darurat, mengingat, kontur aliran sungai di Kota Solo tidak seluruhnya dapat dijangkau menggunakan perahu besar.

“Memang awalnya kita dedikasikan dulu untuk para relawan sungai, agar mereka membawa kano ini dengan baik, karena tidak semua tempat sungai di Solo ini, bisa di dekati perahu yang gede, kan ini perahu personal, hanya untuk satu orang, jadi bisa nyusuri di tempat-tempat yang sempit bahkan paling dangkal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KARSA Sabar Gorky



Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI

“Mudah-mudahan kedepan kalo ini sudah dibersihkan lalu juga dari sisi pengelolaan aspek safetynya itu sudah baik, kita berharap dari DPUPR bisa mendorong ini menjadi wisata sungai, karena ini potensi cukup lumayan, kita punya 10 kano saja sudah dilihat masyarakat, mereka sangat antusias, rupanya ini menjadi suatu yang menarik di Solo, karena selama ini belum ada.

mengatakan, adanya bantuan kano ini dapat dimanfaatkan dari berbagai sisi, baik dari pengembangan pariwisata, mendorong kinerja relawan, serta memantik adanya olahraga kano di Kota Solo.

“Bantuan kano ini sangat membantu tim dari Karsa ini

bisa untuk berkarya yang sesuai, dalam arti kalo mau masuk masuk juga kecil itu sangat luar biasa, selain itu, pemanfaatannya juga banyak sekali, bisa pariwisata juga olahraga,” jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Ahmad Syaikhu Serahkan Bus Sekolah di Purwakarta dan Karawang

KUTIPAN

Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu menyerahkan bus sekolah kepada dua yayasan pendidikan di Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Jum'at (11/12).

Penyerahan pertama kepada Yayasan Bina Muslim, di Kabupaten Purwakarta. Kemudian berlanjut kepada Yayasan Nurhasanah di Kabupaten Karawang.

Syaikhu mengatakan, bus sekolah ini harus dimanfaatkan keberadaannya untuk kegiatan sekolah.

"Tidak banyak lembaga pendidikan yang mendapatkan bus sekolah. Karena itu bantuan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah," ujar Syaikhu.

Politisi PKS yang biasa disapa Asyik itu juga meminta agar bus sekolah dirawat. Agar tetap nyaman dipakai dan berusia panjang.

"Rawat dan jaga bus

sekolah ini. Sering diservis agar panjang umur pemakaiannya dan tetap nyaman saat dipakai," kata Syaikhu.

Syaikhu mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Perhubungan (Kemenuh) yang telah memberikan bantuan bus sekolah ini.

"Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada Kemenuh. Bantuan ini merupakan kerjasama DPR dengan Kemenuh," ucap Syaikhu.

Ketua Yayasan Bina Muslim Toha Mahsun bersyukur bisa mendapatkan bantuan ini.

"Saya bersyukur yayasan yang saya pimpin mendapatkan bantuan ini. Terimakasih Pak Syaikhu dan Kemenuh," kata Toha.



H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jabar V

Tidak banyak lembaga pendidikan yang mendapatkan bus sekolah. Karena itu bantuan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Rawat dan jaga bus sekolah ini. Sering diservis agar panjang umur pemakaiannya dan tetap nyaman saat dipakai,"



Politisi PKS Bersama BPOM Pontianak Salurkan Ribuan Paket Sembako

KUTIPAN

Pontianak (07/12) — Badan POM Pontianak bersama Komisi IX DPR RI, melaksanakan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) ke masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan sembako ke warga di Pontianak dan Kubu Raya, Senin (07/12).

Anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Alifudin mengapresiasi program bantuan badan POM Pontianak yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, kegiatan KIE yang biasanya seminar edukasi, saat ini dialihkan juga untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Saya kira ini bagus sekali, bantuan langsung sembako dan juga penjelasan mengenai obat-

obatan dan bahan makanan yang boleh dikonsumsi warga," ujarnya saat memberikan sembako ke warga di Gang Bansir, Pontianak.

Alifudin juga berharap bantuan sembako ini bisa tepat sasaran, agar benar benar bisa diberikan ke warga yang tak mampu.

"Kami dari komisi IX DPR RI mengawasi terus dan juga selalu mendukung program-program yang langsung bermanfaat bagi warga, seperti program KIE kali ini, untuk pemberdayaan warga juga," tambahnya.

Sebanyak 2000 paket sembako disalurkan ke warga yang terkena dampak Covid-19, Merry Oktoviana Damera, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi yang turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut mengatakan program bantuan ini dalam rangka pemberdayaan masyarakat dari Balai POM Pontianak yang bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja.

Mery mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan

dukungan dari komisi IX DPR RI dalam pelaksanaan program KIE kali ini.

"Terimakasih kepada pak Alifudin yang bisa hadir bersama kami mewakili komisi IX DPR RI, paket bantuan sembako ini akan kami salurkan ke warga yang berhak menerimanya," jelasnya.



H. ALIFUDIN, S.E.,M.M.
Anggota Komisi IX DPR RI



Saya kira ini bagus sekali, bantuan langsung sembako dan juga penjelasan mengenai obat-obatan dan bahan makanan yang boleh dikonsumsi warga. Kami dari komisi IX DPR RI mengawasi terus dan juga selalu mendukung program-program yang langsung bermanfaat bagi warga, seperti program KIE kali ini, untuk pemberdayaan warga juga

Sakinah Aljufri Lantik dan Kukuhkan Pengurus Wanita Islam Al-Khairaat Papua Barat

KUTIPAN

Sorong (02/12) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, melantik dan mengukuhkan Pengurus Wanita Islam Al-Khairaat Provinsi Papua Barat periode 2020-2024

dan pengurus WIA setingkat Kabupaten Kota di tiga Kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong periode 2020-2023.

Pelantikan dan pengukuhan pengurus WIA dilaksanakan di Swiss Belhotel Manokwari, Rabu, (25/11/2020) lalu.

Dalam sambutannya, Sakinah mengapresiasi terbentuknya organisasi WIA di Papua Barat.

"Terima kasih atas terlaksananya pelantikan dan pengu-

kuhan pengurus WIA se Papua Barat, karena dengan terbentuknya organisasi ini dapat menjadi wadah pelaksanaan program kerja WIA di masing-masing daerah," ujar Sekjen Wanita Islam Al-Khairaat Pusat.

Sakinah juga mengucapkan pelantikan pengurus WIA Papua Barat dapat mengembangkan organisasi WIA menjadi lebih besar.

"Berikutnya dengan terlaksananya pelantikan dan pengukuhan pengurus WIA Papua Barat sebagai tolak ukur akan terlaksananya program WIA di masa datang akan lebih

baik, baik program pendidikan (RA dan TK) dan pengembangan organisasi WIA itu sendiri. Organisasi WIA di daerah ini diharapkan oleh pengurus WIA pusat Palu agar dapat memberikan andil dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun provinsi Papua Barat," ujar Sakinah

Diakhir sambutan, Sakinah berharap pengurus WIA yang baru dilantik dan dikukuhkan selalu bekerja sama dan tetap kompak dalam menjalankan program.

"Harapan segenap pimpinan Wanita Islam Al-Khairaat pusat Palu mengharapkan kepada pengurus daerah WIA Papua Barat dapat menjalin kerjasama yang baik dan pengurus WIA di tingkat daerah/ kabupaten dan menyatukan langkah dan senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan program Wanita Islam Al-Khairaat se Papua Barat," pungkas cucu dari guru tua pendiri lembaga Al-Khairaat.

"Selamat kepada pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan, selamat bekerja," pungkas Sakinah.

Selain melantik dan mengukuhkan pengurus WIA Papua Barat, Sakinah juga melakukan peletakan batu pertama TK Al-Khairaat dan berkunjung ke kantor DPW PKS Papua Barat sehari setelah melakukan pelantikan.



Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil

Harapan segenap pimpinan Wanita Islam Al-Khairaat pusat Palu mengharapkan kepada pengurus daerah WIA Papua Barat dapat menjalin kerjasama yang baik dan pengurus WIA di tingkat daerah/ kabupaten dan menyatukan langkah dan senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi dalam menjalankan program Wanita Islam Al-Khairaat se Papua Barat

ODHA di Bekasi Tinggi

Nur Azizah: Negara Harus Hadir Atasi Permasalahan Remaja!

KUTIPAN

Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A., dalam Kunjungan Dapil (Kundapil) di Hotel Avenzel Kota Bekasi pada Sabtu (28/11),

Nur Azizah menyampaikan bahwa tahun 2019 sebanyak 1.000 warga Kota Bekasi tercatat sebagai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), menjadikan Kota Bekasi menempati peringkat kedua dengan jumlah ODHA tertinggi di Jawa Barat.

“Rata-rata ODHA itu beragam. Namun, paling besar di dominasi dari kalangan produktif, mulai usia 17 tahun sampai 47 tahun. Berdasarkan informasi Pengelola Program HIV, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, penyebab penyakit ini di dominasi oleh perilaku seks bebas. Dari data Dinkes Bekasi periode Januari hingga November, sebanyak 145 orang remaja di Kota Bekasi positif mende-

rita HIV”, terang Nur Azizah.

Menurut Nur Azizah, persoalan ini tidak boleh dianggap remeh, pemerintah harus hadir mengatasi persoalan ini. “Saat ini teknologi semakin mudah untuk di akses, informasi dari yang baik sampai yang menyimpang juga dapat diakses dengan mudah, termasuk konten-konten pornografi yang dapat merusak moral bangsa, mengganggu para remaja terjerumus perilaku seks bebas. Pemerintah harus hadir mengawasi derasnya arus informasi yang masuk. Serta menindak tegas pelaku penyebaran pornografi”, jelas Nur Azizah.

Menurut Windarto Kepala Yayasan Pendidikan Ibnu Sina,

Kota Jakarta. Sebagai pendidik, ia menginginkan komitmen pemerintah untuk segera menaggulangi permasalahan ini. “Kami perlu komitmen yang tegas dari pemerintah kaitannya dengan tayangan-tayangan yang merusak moral. Buat kami tingginya angka ODHA itu dipicu oleh hal yang sepertinya negara tidak mengganggu itu hal yang serius”, jelas Windarto.

Windarto menambahkan, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2019, remaja usia SMP yang sudah tidak perawan itu mencapai 67%, 27% diantaranya sudah melakukan aborsi. “Berbeda dengan jaman kita dulu yang masih usia SD atau SMP pacaran saja malu, pegangan tangan itu suatu hal yang luar biasa. Hari ini pacaran anak SMP kalau gak hubungan badan itu gak pacaran. Salah satu sebabnya karena negara membiarkan tayangan-tayangan yang merusak moral. Banyak selebritis dan artis kita yang berbicara di medsos soal hal-hal yang vulgar. Anak-anak sekarang juga sudah sangat pintar memegang gadgetnya sendiri”, tutur Windarto.

Menanggapi kondisi tersebut Nur Azizah menjelaskan bahwa saat ini, negara memang belum hadir secara utuh dalam membimbing para remaja yang sudah masuk usia aqil baligh. “Jadi mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, konten-konten media sosial yang dapat merusak moral, harus di tindak.



Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI

Negara memang belum hadir secara utuh dalam membimbing para remaja yang sudah masuk usia aqil baligh. “Jadi mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, konten-konten media sosial yang dapat merusak moral, harus ditindak.

Selain itu, Progam Bina Keluarga Remaja (BKR) harus semakin intensif digalakkan hingga tingkat RW atau sampai RT di seluruh daerah. Para orangtua yang memiliki remaja harus diberi bimbingan

bagaimana mengelola remaja supaya sukses. Sukses tentu dalam hal pendidikan, kesehatan, tentunya tujuannya untuk menjadi insan yang sejahtera di dunia dan di akhirat”, pungkas Nur Azizah.

Banjir Melanda Sebagian Purbalingga, Rofik Hananto Kirimkan Bantuan

KUTIPAN

Purbalingga (03/12) — Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Purbalingga pada Rabu (02/12/2020) malam, mengakibatkan meluapnya sungai klawing, dan menyebabkan sejumlah wilayah terkena banjir.

Ratusan jiwa terpaksa mengungsi karena air masuk ke dalam rumah hingga ketinggian lebih dari satu meter.

"Ketinggian banjir di berbagai wilayah bervariasi, dari lutut orang dewasa hingga mencapai atap rumah warga. Petugas gabungan dari BNPB, PMI, SAR, TNI, BPBD dan Polri pun diterjunkan untuk mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman," ungkap Imam, warga Desa Sumilir,

Beberapa desa dengan banjir cukup parah diantaranya desa Jetis, desa Muntang, desa Gambarsari, desa Sumilir, desa Toyareka, dan desa Kalialang.

Rofik Hananto, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai

Keadilan Sejahtera langsung mengirimkan bantuan logistik untuk membantu kebutuhan para korban banjir.

Rofik mengirimkan tim untuk menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada warga terdampak banjir.

Ditemui di tempat lain rofik mengatakan bahwa team relawan semar atau sedulur mas rofik diterjunkan untuk mengirimkan bantuan logistik Kamis pagi ini.

"Kami pagi ini kami mengirimkan team untuk menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, kami mendapatkan informasi banyak titik-titik banjir sampai dengan dini hari tadi terus bertambah."

Kata Rofik

"Tentu makanan siap saji menjadi salah satu bantuan yang sangat dibutuhkan, karena sampai dengan pagi tadi, bantuan makanan masih sangat minim, apalagi masyarakat juga masih terkeping banjir." Tambahnya

Rofik berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu para korban banjir.

"Tentu bantuan ini tidak seberapa, tetapi kami berharap bantuan ini dapat sedikit mengurangi beban mereka." Tegas Rofik.

Kondisi jalan yang banyak tergenang banjir membuat para relawan harus benar-benar berhati-hati, bahkan relawan harus menaiki traktor untuk dapat mendistribusikan bantuan.

Masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan, ini sangat membantu sekali." Kata Yanti.



H. ROFIK HANANTO, SE
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Kami pagi ini kami mengirimkan team untuk menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, kami mendapatkan informasi banyak titik-titik banjir sampai dengan dini hari tadi terus bertambah."

Legislator PKS Sosialisasikan Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Prospektif Dimasa Depan

KUTIPAN

Bukittinggi (03/12) --- Anggota DPR RI asal PKS, Nevi Zuairina di daerah pemilihannya Sumatera Barat turut berpartisipasi bersama kementerian Koperasi dan UKM,

mensosialisasikan koperasi di pelosok-pelosok untuk menjadi besar sebagai lembaga ekonomi terdepan di masa yang akan datang.

Nevi berkeyakinan, bahwa ketika ada lembaga ekonomi yang kokoh yang mampu berkembang dan maju pada daerah yang terpencil, maka persoalan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia akan menjadi baik bahkan cenderung kokoh.

Selama ini, kata Nevi perekonomian Indonesia masih tergolong rapuh, dan perlu upaya masif untuk melakukan langkah-langkah berkelanjutan agar secara terus menerus

membangun kekuatan ekonomi dari lembaga terkecil.

"Saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan dalam partisipasi sosialisasi koperasi ini di daerah.

Koperasi ini berdasar pada nilai prinsip. Pusatnya ada di masyarakat. Kedepannya, diharapkan menjadi simbol ekonomi kerakyatan yang benar-benar menjadi pilar kekuatan ekonomi di tengah masyarakat di seluruh pelosok dari desa hingga kota", ucap Nevi.

Politisi PKS ini dalam sambutannya, mengingatkan kembali akan konsep pembangunan koperasi yang

menjadikan anggota sebagai objek dan subjek utama dalam menjalankan roda kelembagaannya.

"Kualitas produk, persoalan mitra dan pasar, permodalan, dan perencanaan menjadi kunci sukses dalam aplikasi jalannya koperasi," terang Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini berharap, model usaha koperasi yang di terapkan di Bukittinggi pada khususnya, dan di Sumbang pada umumnya dapat tumbuh dan besar di atas usaha anggota.

"Ada kerjasama yang baik untuk melangkah bersama pada arah tujuan yang sama dan para pengurus-pengurusnya menjalankan misi yang adaptif terhadap perubahan-perubahan sering jaman yang juga berubah mengikuti pasar," paparnya.

"Saya berharap, semua koperasi di sumbar akan mampu beradaptasi pada sistem digital yang kemungkinan besar akan dipakai pada seluruh sistem lembaga. Dengan dukungan akuntabilitas dan sdm profesional, kompeten di bidangnya, akan memperlancar terwujudnya koperasi sebagai lembaga yang kokoh di tengah-tengah masyarakat. Semoga konflik kepentingan yang menghambat majunya koperasi dapat di hilangkan, sehingga Koperasi menjadi Penopang utama bisnis UMKM di Indonesia", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

Saya berharap, semua koperasi di sumbar akan mampu beradaptasi pada sistem digital yang kemungkinan besar akan dipakai pada seluruh sistem lembaga. Dengan dukungan akuntabilitas dan sdm profesional, kompeten di bidangnya, akan memperlancar terwujudnya koperasi sebagai lembaga yang kokoh di tengah-tengah masyarakat.

Andi Akmal Hadiri Silaturahmi Pagelaran Seni Budaya Kab. Bone

KUTIPAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Pagelaran Seni Budaya Kabupaten Bone dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Pagelaran seni budaya di Kabupaten Bone ini terlaksana atas inisiasi anggota MPR RI Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.

Putra Bugis kelahiran Bone ini menyatakan budaya harus diperkuat untuk membangun daerah dan bangsa. Menurut Andi, salah satu upaya untuk memperkuat budaya adalah dengan melakukan silaturahmi kebangsaan.

"Silaturahmi kebangsaan seperti pagelaran seni budaya ini, akan menguatkan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia dan juga akan menguatkan rasa nasionalisme kita. Karena budaya memperkuat nilai-nilai agama. Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai agama," kata Andi pada acara yang digelar di Helios

Hotel, Kota Watampone, Ibu Kota Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Jum'at (4/12).

Andi menilai pagelaran seni budaya dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini memang agak khas. "Kami orang Bone, orang suku Bugis mempunyai budaya yang kuat," tegas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKPS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.

Menurutnya, Bone ternyata memang memiliki seni budaya adiluhung. Karena itu, dalam pagelaran seni budaya kali ini ditampilkan kearifan lokal berupa tarian-tarian yang menceritakan tentang kehidupan pada masa Kerajaan Bone .



"Silaturahmi kebangsaan seperti pagelaran seni budaya ini, akan menguatkan nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia dan juga akan menguatkan rasa nasionalisme kita. Karena budaya memperkuat nilai-nilai agama. Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya lokal dan nilai-nilai agama

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II



*Turut
Berduka
Atas Wafatnya*



Keluarga Besar Fraksi PKS DPR RI
Turut Berduka Atas wafatnya

Dr. KH. Muinudinillah Basri, Lc. MA

Anggota Majelis Syuro PKS dari Jawa Tengah

Pada Selasa 08 Desember 2020 pk. 19.25 WIB
di Jawa Tengah

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik Jannah-Nya
Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI



Presiden PKS Minta Kader Terus Kawal Suara hingga Akhir

KUTIPAN

Jakarta (09/12) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul meminta para kader serta struktur PKS mengawal perolehan suara yang didapatkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS dalam Pilkada 2020.

Jakarta (09/12) — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul meminta para kader serta struktur PKS mengawal perolehan suara yang didapatkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS dalam Pilkada 2020.

"Saya instruksikan kepada seluruh kader PKS yang bertugas sebagai saksi di lapangan harus selalu siaga mengawal hingga akhir," pesan Syaikhul di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Ia mengingatkan agar seluruh unsur baik struktur maupun kader agar tetap siaga termasuk dengan hasil hitung cepat.

"Jangan sampai rela dibuai kesenangan sesaat yang dapat

membuat terlena, sebelum benar-benar hadir keputusan formal akhir yang konstitusional datang," tegas Syaikhul.

Syaikhul menyampaikan hasil quick count pasangan real count dari berbagai lembaga survei ataupun intitusi ini harus disikapi dengan tepat dan proporsional.

"Sah-sah saja kita bergembira dengan hasil sementara yang menunjukkan paslon yang kita usung dan kita dukung unggul. Namun mari kita lebih mengutamakan bersyukur dan terus bersyukur," ucap Syaikhul mengingatkan.

Sebaliknya, lanjut Syaikhul, jika hasil sementara menunjukkan pasangan calon yang kita usung dan dukung berada di

angka yang rendah jangan pesimistis dan patah arang.

"Sampai detik dan proses akhir, keputusan hasil pemilu masih belum pasti dan bisa berubah. Peluang menang masih akan ada," ujar dia.

Syaikhul juga mendorong para penyelenggara terkhusus yang bertugas di lapangan seperti KPPS, PPS, PPK serta personel KPU tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional agar dapat menjalankan tugasnya dengan transparan, integritas, dan profesional.

"Kita semua berkeinginan kuat agar Indonesia mampu mencapai demokrasi yang bukan hanya prosedural asalkan Pemilu berjalan saja, melainkan Pemilu yang substantif," jelas dia.

Syaikhul mengingatkan kepada seluruh pihak, secara khusus kader PKS, yang bertugas di lapangan agar senantiasa melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

"Dimanapun dan dalam kondisi apapun saat menjalankan tugas mengawal proses Pilkada sampai akhir," ucap Syaikhul.

Syaikhul menegaskan kesehatan dan keselamatan jiwa saat ini tetap menjadi prioritas utama.

"Saat badan kita lelah, maka istirahatlah sejenak. Jika benar-benar mengalami gejala dan merasa sakit, maka segera untuk menemui tim medis," ujar Syaikhul.



H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

Saya instruksikan kepada seluruh kader PKS yang bertugas sebagai saksi di lapangan harus selalu siaga mengawal hingga akhir, Jangan sampai rela dibuai kesenangan sesaat yang dapat membuat terlena, sebelum benar-benar hadir keputusan formal akhir yang konstitusional datang

Nevi Zuairina Turut Pantau Pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat

KUTIPAN

Padang Pariaman (09/12) --- Legislator PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina turut memantau pelaksanaan Pilkada di Sumatera Barat.

Salah satu kunjungannya adalah pada TPS 01 Sungai Abang Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.

Pilkada Serentak tahun 2020 ini, Provinsi Sumatera Barat turut sebagai salah satu Provinsi yang menggelar pilkada, bersama 13 kabupaten kota di Sumbar.

"Siapun pemenang di Pilkada serentak yang ada di Sumatera Barat, Saya sangat berharap mereka semua menjadi pelayan umat. Rakyat Sumbar semoga mendapat pemimpin yang mampu menjadikan setiap pelosok daerah di Sumbar menjadi negeri yang diberkati, negeri yang mampu menjadi simbol kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan", tutur Nevi.

Politisi PKS ini pada pilkada sumbar ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

seluruh penyelenggara dan semua yang terlibat pada pelaksanaan pilkada termasuk pengawas mulai dari panitia tingkat TPS hingga di Propinsi atas dedikasinya menjadi pelayan masyarakat pada event nasional ini.

"Moment Pilkada ini sebagai ajang pembuktian seseorang ini sebagai negarawan atau tidak. Sikap dan respon apapun yang terjadi, baik yang kalah maupun yang menang akan menunjukkan jati diri sebenarnya para calon pemimpin bangsa ini. 49 pasangan calon di Sumbar yang mengikuti hajat nasional regenerasi kepemimpinan bangsa ini adalah orang-orang terbaik dalam proses peningkatan kedewasaan cara berdemokrasi di Sumatera Barat", ucap Nevi.

Nevi yang juga istri Gubernur Sumatera Barat ini

berharap, kepemimpinan gubernur Sumbar selanjutnya dapat meneruskan kebaikan-kebaikan Gubernur saat ini dalam pembangunan fisik dan non fisik di Sumbar.

"Keberlanjutan dan sinergitas ini akan mampu Sumbar semakin maju pesat karena adaptasi keberlanjutan lebih menguntungkan daripada memformula dari awal pada semua aspek pembangunan baik manusia maupun infrastrukturnya."

"Kita semua berdo'a, agar bangsa ini semakin maju dan baik, masyarakatnya rukun, pembangunan pesat, ekonomi, pendidikan dan kesehatan semakin kokoh untuk rakyat Indonesia. Majunya suatu bangsa, indikatornya akan terlihat jelas pada 3 faktor utama yakni kualitas, ekonomi masyarakatnya, pendidikan rakyatnya dan kesehatan rakyatnya. Semoga Indonesia akan jaya pada tiga indikator tersebut", tutup Nevi Zuairina.



Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar I

Keberlanjutan dan sinergitas ini akan mampu Sumbar semakin maju pesat karena adaptasi keberlanjutan lebih menguntungkan daripada memformula dari awal pada semua aspek pembangunan baik manusia maupun infrastrukturnya

Pilkada Momentum Emas Rakyat **Pergunakan Kedaulatan** untuk Indonesia Lebih Baik

KUTIPAN

Jakarta (08/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, saat bertemu tokoh di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta menyampaikan,

agar Rakyat makin mencintai Indonesia; Ideologinya, Konstitusinya, Bentuknya, dan Sembolannya, serta sejarahnya dan daerahnya, antara lain dg memahami dan mengamalkan 4 Pilar MPR RI. Karena didalamnya, lanjut Hidayat, juga ada ketentuan bahwa Rakyatlah pemilik kedaulatan tertinggi, sehingga mereka perlu memaksimalkan kedaulatan yang telah diberikan oleh Konstitusi (UUD NRI 1945), antara lain melalui peran serta maksimal mensukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan segera berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Hidayat dalam Temu Tokoh bersama dengan Yayasan Peningkatan

dan Pengembangan Sumber Daya Ummat di Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (04/12).

HNW, sapaan akrabnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan salah satu dari 4 pilar MPR RI bersama dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, telah menghadirkan ketentuan baru terkait Pemilu dan Kedaulatan Rakyat.

"Karena sebelum UUD 45 diamandemen, disana tidak ada aturan tentang Pemilu (termasuk Pilkada) dan bahwa Kedaulatan Rakyat adanya di MPR bukan dilakukan langsung oleh Rakyat," terangnya.

Sekarang, imbuw HNW, setelah amandemen, UUD mengatur secara tegas kedaulatan di tangan Rakyat,

dan pemilihan kepala daerah langsung oleh Rakyat.

"Sejumlah pasal dalam UUD NRI 1945 hasil amandemen telah menegaskan kedaulatan di tangan rakyat dan pemilihan langsung oleh Rakyat, bukan oleh DPRD" ujarnya.

HNW menuturkan bahwa ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

Sebelum perubahan, ketentuan itu berbunyi, 'Kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).'

Pasca amandemen, ketentuan itu berubah menjadi 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.'

"Dalam konteks pemilihan Presiden, dahulu kewenangan itu dipegang oleh MPR, sekarang sudah langsung dilakukan oleh rakyat. Begitu juga dengan kepala daerah, bila dahulu dipilih oleh DPRD, saat ini melalui Pilkada, rakyat bisa memilih secara langsung pemimpinnya" jelasnya.

HNW berharap rakyat



Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A
Wakil Ketua MPR RI

"Janganlah kedaulatan yg telah diberikan itu justru dimubazirkan dengan golput atau memilih secara asal-asalan. Nanti akan menyesal sendiri. Jangan mau kedaulatan yg berharga itu malah dihargai dengan money politik yang tidak seberapa, jangan mau ditipu dengan janji palsu, atau bantuan sembako yang mempengaruhi pilihan

dapat memaksimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung tersebut, termasuk pada Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 9 Desember ini.

"MPR sudah rela menyerahkan kedaulatan itu kpd Rakyat, dan UUD memberikan kuasa itu kepada

Rakyat. Maka, rakyat harus betul-betul memaknai bahwa ini amanat dan masalah yang penting. Kepercayaan yang luar biasa ini harusnya disukseskan. Jangan dimubazirkan dan disiasikan kedaulatan yang telah diberikan itu" ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Netty: Pemerintah Harus Antisipasi Risiko Munculnya Klaster Baru Pilkada

KUTIPAN

Jakarta (08/12) --- Total sekitar 100.359.152 pemilih, 50,2 persennya perempuan yang akan memberikan hak pilihnya pada Pilkada 9 Desember 2020

Sejumlah pengamat mengkhawatirkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetyani Aher meminta pemerintah agar benar-benar memerhatikan keselamatan rakyat dengan melakukan langkah antisipasi lonjakan kasus.

"Pemerintah harus memerhatikan keselamatan rakyat dengan mengantisipasi risiko munculnya klaster-klaster baru penularan Covid-19," kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (08/12).

Menurut Netty, kerumunan massa di TPS pada hari pemilihan dan penghitungan suara sangat potensial menjadi ajang penularan Covid-19 jika

tidak dilakukan upaya pencegahan.

"Keramaian di TPS akan mengundang orang datang dan berkerumun, apalagi saat penghitungan. Jika tidak diantisipasi, pasca Pilkada kita akan panen kasus," katanya.

"Berkaca dari beberapa waktu lalu, rangkaian tahapan Pilkada tidak berjalan dengan tertib dan sesuai dengan prokes. Para pendukung paslon banyak yang berkerumun dan tidak menggunakan masker. Kita harus memastikan hal ini tidak terjadi lagi dan pemerintah harus bertindak tegas jika ada aktivitas yang berisiko untuk menularkan Covid-19," kata Netty.

"Buat skema sanksi di

mana para paslon dan pendukungnya takut untuk melanggarnya. Kita tak boleh meremehkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran demi pelanggaran begitu saja," tambah Netty.

Netty juga menyoroti soal pemberian hak memilih bagi pasien Covid-19 yang sedang menjalani perawatan. Menurut Netty, setiap warga yang memenuhi persyaratan undang-undang memang memiliki hak pilih, namun keselamatan warga yang lain juga perlu dipikirkan.

"Pemenuhan hak ini harus dijalankan dengan benar agar jangan justru jadi bencana. Lakukan edukasi kepada petugas KPPS supaya tidak tertular saat mengambil suara dari pasien Covid-19. Dampingi mereka dengan tenaga kesehatan. KPU juga harus membuat skema teknis baku yang taat prokes untuk para petugas yang mengambil suara dari pasien Covid-19," kata Netty.

Netty menyarankan agar sebaiknya pengambilan suara pasien Covid-19 bersifat ambil bola.

"Jika ada permohonan dari pasien, baru petugas mendatangi yang bersangkutan. Jika tidak, dianggap absen atau blanko. Anggap saja sama dengan yang sehat, jika tidak mau mendatangi TPS, maka suaranya hilang," paparnya.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah meningkatkan jumlah testing di daerah-daerah.



Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si |
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI

“Pemenuhan hak ini harus dijalankan dengan benar agar jangan justru jadi bencana. Lakukan edukasi kepada petugas KPPS supaya tidak tertular saat mengambil suara dari pasien Covid-19.

“Terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, testing harus ditingkatkan agar masyarakat yang berkumpul relatif lebih aman. Berharap hanya kepada penerapan prokes tidak menjamin tidak adanya penularan Covid-19” kata Netty.

“Selain itu, sarana dan

prasarana untuk menerapkan prokes harus tersedia lengkap. Di tempat pencoblosan harus ada fasilitas mencuci tangan dan untuk penerapan 3M lainnya. Pemerintah harus mengaturnya secara serius agar Pilkada tidak menjadi bencana” tandasnya.

Info PROGRAM MAGANG BATCH II

Humas Fraksi PKS DPR RI membuka kesempatan magang untuk mahasiswa yang sedang menjalankan program magang dari kampus/universitas



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Berikut persyaratannya

- 1 Pria/Wanita
- 2 Sehat Jasmani dan Rohani
- 3 Mahasiswa S1 yang sedang menjalankan program magang dari kampus
- 4 Bersedia di tempatkan yang sesuai dengan kemampuannya
- 5 Bersedia mengikuti semua peraturan Humas Fraksi PKS DPR RI
- 6 Waktu magang minimal 3 bulan
- 7 Melampirkan Surat keterangan magang dari kampus
- 8 Jurusan/Fakultas yang sesuai yaitu Mahasiswa jurusan **Komunikasi, Politik dan Desain Komunikasi Visual (DKV)**

Silahkan kirim CV dan portofolio anda ke email :

pksparlemen01@gmail.com

Paling lambat 18 Desember 2020





**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV-DPR-RI)

***Nantikan
Setiap Akhir
Pekan***